IMPLEMENTASI KEWENANGAN PERANGKAT KELURAHAN GEDANGANAK KABUPATEN SEMARANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu

(S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : Hofifah

NIM : 22110010

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN (GUPPI)

UNDARIS

TAHUN 2026/2027

LEMBAR PENYERAHAN

IMPLEMENTASI KEWENANGAN PERANGKAT KELURAHAN GEDANGANAK KABUPATEN SEMARANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Yang diajukan oleh :

NAMA : Hofifah

NIM : 22110010

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris)
Pada Hari Kamis Tanggal 16 April 2026

Pembimbing Pembantu	Pembimbing Utama
Ridho Sa'dillah A., S.H., M.H	Lailasari Ekaningsih, SH., M.H

LEMBAR PENYERAHAN

IMPLEMENTASI KEWENANGAN PERANGKAT KELURAHAN GEDANGANAK KABUPATEN SEMARANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Yang diajukan oleh :

NAMA : Hofifah

NIM : 22110010

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris)
Pada Hari Kamis Tanggal 16 April 2026

Pembimbing Pembantu	Pembimbing Utama
Ridho Sa'dillah A., S.H., M.H	Lailasari Ekaningsih, SH., M.H

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KEWENANGAN PERANGKAT KELURAHAN GEDANGANAK KABUPATEN SEMARANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dipersiapkan dan disusun oleh:

NAMA : Hofifah

NIM : 22110010

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) Pada Hari Selasa Tanggal 30 Juni 2026 Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus .

Dewan Penguji, Ketua,

Lailasari Ekaningsih, SH.,M.H

NUPTK : 7450771672230222

Anggota,

Ridho Sa'dillah A., S.H., M.H

NUPTK: 1140774675130213

Anggota,

Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H

NUPTK: 2334770671130333

Mengetahui,

Dekan,

Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H

NUPTK: 1248747648130113

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."

(Q.S. An-Nisa: 58)

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah."

(Q.S. Ali Imran: 159)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti. Terima kasih atas segala keikhlasan dan ketulusan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Tanpa doa dan restu kalian, penulis tidak akan sampai pada titik ini.
2. Kedua Kakak saya, yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta dukungan moral dalam setiap proses yang penulis jalani. Kehadiran kalian menjadi kekuatan tersendiri dalam menghadapi berbagai tantangan selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS), khususnya dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat berharga bagi penulis. Segala ilmu yang diberikan menjadi bekal penting dalam perjalanan akademik maupun kehidupan penulis ke depan.
4. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta kebersamaan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala cerita, perjuangan, dan kenangan yang telah kita lalui bersama.
5. Karya ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri. Saya telah melalui banyak ujian, kelelahan, dan keraguan selama proses penyusunan skripsi ini. Tidak mudah, bahkan ada saat saya ingin menyerah. Namun saya bersyukur, saya tetap bertahan dan mampu menyelesaikannya. Terima kasih untuk diri saya yang tidak berhenti berjuang.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan perangkat Kelurahan Gedanganak Kabupaten Semarang dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, khususnya dalam menjalankan peran preventif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalahan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan kesenjangan antara aturan dengan pelaksanaannya di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, dengan subjek perangkat kelurahan dan masyarakat yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum dengan kondisi nyata di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat kelurahan telah menjalankan peran administratif dan preventif, seperti penyampaian informasi melalui RT/RW dan koordinasi dengan instansi terkait. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi langsung, serta lemahnya pengawasan. Selain itu, sebagian masyarakat menganggap administrasi kependudukan tidak penting karena belum merasakan manfaatnya. Kendala utama meliputi rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pendekatan langsung dari aparatur kelurahan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, serta pelayanan yang lebih responsif dan proaktif agar tertib administrasi kependudukan dapat terwujud.

Kata Kunci: administrasi kependudukan, peran preventif, kelurahan, kesadaran.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the authority of Gedanganak Village officials in Semarang Regency in administering population administration, particularly in carrying out preventive roles in accordance with Law Number 24 of 2013. This research is motivated by problems such as low public awareness in managing population documents and the gap between regulations and their implementation in practice. The research method used is a sociological juridical approach with a descriptive qualitative design. Data were collected through interviews, observations, and literature studies, involving village officials and community members selected purposively. Data analysis was conducted by comparing legal provisions with actual field conditions. The results show that village officials have carried out administrative and preventive roles, such as delivering information through neighborhood units (RT/RW) and coordinating with related institutions. However, the implementation is not yet optimal due to low public awareness, lack of direct socialization, and weak supervision. In addition, some community members consider population administration unimportant because they do not perceive its direct benefits. The main obstacles include low community participation and lack of direct engagement from village officials. Therefore, improvements are needed through better socialization, public education, and more responsive services to achieve orderly population administration.

Keywords: population administration, preventive role, village government, public awareness

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Implementasi Kewenangan Perangkat Kelurahan Gedanganak Kabupaten Semarang tentang Administrasi Kependudukan"* dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris). Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

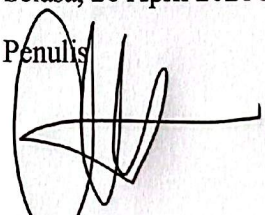
1. Dr. Ida Zahara Adibah, S.Ag., M.Si. selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di universitas ini.
2. Bapak Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).
3. Surya Kusuma Wardana S.H., M.H selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universias Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).
4. Ibu Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H selaku Kaprodi dan Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ridho Sa'dillah A., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat.
6. Dr. Muhammad Zainuddin, S.H,. M.H H selaku Dosen Penguji Pembantu yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat.

7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
8. Bapak Yunianto, S.H., M.A selaku Lurah Kelurahan Gedanganak beserta seluruh perangkat kelurahan yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
9. Seluruh responden dan masyarakat Kelurahan Gedanganak yang telah bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
10. Kedua orang tua tercinta dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, serta semangat kepada penulis.
11. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum administrasi negara, serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Selasa, 28 April 2026 Kabupaten Semarang

Penulis



Hofifah

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Hofifah menyatakan bahwa karya ilmiah skripsi yang berjudul:“ Implementasi Kewenangan Perangkat Kelurahan Gedanganak Kabupaten Semarang” Tentang Administrasi Kependudukan adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 (S1) di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris). Seluruh informasi yang dimuat dalam skripsi ini yang berasal dari karya orang lain, baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, telah diberikan penghargaan dengan cara mengutip sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dan metode penulisan hukum yang berlaku. Dengan demikian, segala isi dan konsekuensi dari karya ilmiah skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Kabupaten Semarang, 18 April 2026,

Penulis,



Hofifah

NIM 2211010

DAFTAR ISI

LEMBAR PENYERAHAN i
LEMBAR PENGESAHAN ii
MOTTO iii
PERSEMBAHAN iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
KATA PENGANTAR vii
LEMBAR PERNYATAAN ix
DAFTAR ISI x
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar belakang 1
1.2. Rumusan masalah 6
1.3. Tujuan penelitian 6
1.4. Sistematika penulisan 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
2.1. Administrasi kependudukan 10
2.2. Peran dan fungsi perangkat 11
2.3. Konsep peran preventif dan hukum administrasi 12
2.4. Keterwakilan pihak dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan 13
2.5. Pelayanan public implementasi kebijakan 14
2.6. Penelitian terdahulu yang relevan 15
2.7. Kesadaran hukum Masyarakat 15
2.8. Efektivitas hukum dalam Masyarakat 15
2.9. Konsep pelayanan publik yang responsif 16
BAB III METODE PENELITIAN 17
3.1. Metode pendekatan masalah 17
3.2. Spesifikasi penelitian 20
3.3. Metode pengumpulan sampel (subjek penelitian) 21
3.4. Metode pengumpulan data 22
3.5. Bahan hukum 24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 30
4.1. Kelurahan gedanganak 30

4.2. Gambaran umum hasil penelitian 30
4.3. Pembahasan berdasarkan rumusan masalah 31
4.4. Analisis kesenjangan antara norma dan realitas 34
4.5. Analisis persepektif hukum admministrasi negara 38
4.6. Analisis kasus empiris bapak mubaid 47
4.7. Imlikasi penelitian 49
4.8. Analisis perspektif Masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan . 50
4.9. Efektivitas peran perangkat kelurahan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan 54
4.10. Rendahnya kesadaran Masyarakat sebagai faktor penghambat tertib administrasi kependudukan 57
4.11. Strategi peningkatan tertib administrasi kependudukan 59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 63
5.1. Simpulan 63
5.2. Saran 65
5.3. Imlikasi penelitian 68
5.4. Rekomendasi kebijakan 68
5.5. Analisis kritis terhadap kebijakan administrasi kependudukan 69
5.6. Urgensi peningkatan kualitas sumber daya aparatur 70
5.7. Penguatan kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah 71
5.8. Urgensi peningkatan kualitaas sumber daya aparatur 73
5.9. Penegasan akhir *(closing statement)* 74
DAFTAR PUSTAKA 77
LAMPIRAN 80

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perlindungan hak asasi manusia adalah prioritas utama pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebuah negara hukum. Hak atas identitas diri adalah salah satu bentuk perlindungan hak yang paling penting, tetapi seringkali dianggap remeh. Identitas diri bukan sekadar daftar data itu memungkinkan orang untuk memanfaatkan hak-hak konstitusional lainnya seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan hak politik. Administrasi Kependudukan memainkan peran penting dalam struktur negara kita dalam kerangka inilah.[1] Keberadaan administrasi kependudukan sangat strategis karena menjadi dasar dalam memperoleh berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga hak politik. Oleh karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berupaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui pelayanan yang akurat, cepat, dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, upaya preventif atau pencegahan adalah alat yang jauh lebih efektif daripada upaya kuratif, atau penyembuhan setelah masalah terjadi. Peran preventif ini termasuk sosialisasi yang masif, jemput bola pelayanan, dan validasi data berkala. Perangkat kelurahan tidak hanya harus bertindak sebagai administrator pasif, tetapi juga harus menjadi penggerak aktif yang dapat mengidentifikasi masalah administratif sejak dini.[2]

Pemerintah kelurahan berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan realitas sosial masyarakat. Salah satu tanggung jawab perangkat kelurahan adalah memastikan bahwa setiap penduduk yang tinggal di daerah tersebut memiliki daftar warga yang sah. Namun, berbagai tantangan administratif yang kompleks sering

---

[1] Jimly Asshiddiqie, ***Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.*** (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 142.
[2] Ridwan HR, ***Hukum Administrasi Negara.*** Ed. Revisi, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 210.

ditemukan dalam dinamika lapangan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kendala ini termasuk rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akte kelahiran atau kematian, ketidaksinkronan data antara Kartu Keluarga dan KTP, dan prosedur birokrasi yang dianggap rumit oleh masyarakat. Jika masalah ini dibiarkan tanpa adanya upaya preventif, maka akan terjadi tumpukan masalah hukum di masa depan, seperti sengketa ahli waris, ketidakakuratan data pemilih pemilu, hingga tidak tersalurkannya bantuan pemerintah tepat sasaran.[3] Oleh karena itu, upaya preventif atau pencegahan adalah alat yang jauh lebih efektif daripada upaya kuratif, atau penyembuhan setelah masalah terjadi. Peran preventif ini termasuk sosialisasi yang masif, dan validasi data berkala. Perangkat kelurahan tidak hanya harus bertindak sebagai administrator pasif, tetapi juga harus menjadi penggerak aktif yang dapat mengidentifikasi masalah administratif sejak dini. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 58, peran pemerintah dalam pelayanan publik ini memiliki landasan teologis yang kuat dari perspektif Islam. Ayat tersebut menetapkan bahwa yang berhak menerima kekuasaan atau jabatan publik. Dalam administrasi kependudukan, "amanah" ini berarti memastikan bahwa setiap warga memiliki hak untuk mendapatkan dokumen identitas yang sah. Selain itu, ayat ini menyatakan bahwa penetapan hukum harus dilakukan dengan cara yang adil. Keadilan dalam pelayanan publik berarti tidak ada diskriminasi dalam pelayanan, setiap orang, tidak peduli seberapa kaya atau miskin, harus menerima pelayanan administrasi dengan cara yang sama dan tanpa hambatan.[4] Selain itu, keberhasilan perangkat kelurahan dalam melaksanakan fungsi preventif ini sangat bergantung pada metode yang digunakan. Panduan metodologis untuk kepemimpinan humanis diberikan dalam ayat 159 surah Ali 'Imran. Allah SWT memerintahkan mereka

---

[3] Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

[4] Al-Qur’an Surah Ali Imran Ayat 159 tentang kepemimpinan yang lemah lembut dan musyawarah

yang memegang kekuasaan untuk selalu bersikap lemah lembut dan menghindari bertindak kasar. Perangkat kelurahan harus mampu menerima dan memaafkan warga yang mungkin tidak memahami hukum atau tidak peduli dengan administrasi.[5] Selain itu, keberhasilan perangkat kelurahan dalam melaksanakan fungsi preventif ini sangat bergantung pada metode yang digunakan. Panduan metodologis untuk kepemimpinan humanis diberikan dalam ayat 159 surah Ali 'Imran. Allah SWT memerintahkan mereka yang memegang kekuasaan untuk selalu bersikap lemah lembut dan menghindari bertindak kasar. Perangkat kelurahan harus mampu menerima dan memaafkan warga yang mungkin tidak memahami hukum atau tidak peduli dengan administrasi.[6] Mereka juga harus menggunakan musyawarah, juga dikenal sebagai syura, untuk mencari solusi atas masalah yang ada. Konsep komunikatif dan partisipatif ini adalah cara untuk menerapkan rahmatan lil alamin dalam ruang birokrasi dengan tujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara.

Namun, ada perbedaan (gap) antara kenyataan di dunia nyata dan standar hukum yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013. Perangkat kelurahan tidak melakukan tugas pengawasan dan edukasi dengan baik, sehingga masih ada banyak masalah administratif. Ketidaksinkronan data yang berulang dan partisipasi warga yang rendah menunjukkan bahwa fungsi pencegahan belum berjalan sepenuhnya. Sedangkan menurut Lailasari Ekaningsih S.H.,M,H. Aparatur kelurahan memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam sistem administrasi kependudukan. Peran preventif mereka bukan sekadar menjalankan prosedur formal, melainkan memastikan kepastian

[5] Al-Qur'an Surah Ali Imran Ayat 159 tentang kepemimpinan yang lemah lembut dan musyawarah
[6] Al-Qur'an Surah Ali Imran Ayat 159 tentang kepemimpinan yang lemah lembut dan musyawarah

hukum atas status perdata masyarakat guna meminimalisir potensi sengketa hukum di masa depan.[7]

Berdasarkan keadaan ini, peneliti berpendapat bahwa perlu dilakukan evaluasi dan analisis menyeluruh tentang cara aparatur pemerintah di tingkat kelurahan melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dalam bidang kependudukan. Studi ini tidak hanya melihat hukum dari sudut pandang Undang-Undang, tetapi juga menggabungkannya dengan nilai-nilai luhur Al-Qur'an sebagai pedoman moral untuk mengemban amanah kekuasaan. Penelitian ini disebut sebagai "Peran Preventif Perangkat Kelurahan Gedanganak dalam Mengatasi Kendala Administrasi Kependudukan di Masyarakat Sesuai UU Nomor 24 Tahun 2013". Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah tujuan utama negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Pengakuan terhadap status warga negara adalah salah satu bukti perlindungan tersebut. Identitas diri melibatkan "kunci pembuka" untuk akses warga terhadap hak-hak dasar lainnya. Hak-hak seperti hak kesehatan (BPJS), hak pendidikan (KIP), hak politik (pemilu), dan hak perlindungan sosial akan terhambat jika tidak ada administrasi kependudukan yang baik. Hal ini sejalan dengan mandat yang ditetapkan dalam UU No. 24 Tahun 2013, yang menetapkan bahwa negara harus melindungi dan mengakui status hukum dan status pribadi penduduk.[8]

Untuk melindungi dan mengakui status hukum setiap warga negaranya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai negara hukum, bertanggung jawab secara konstitusional. Hak-hak fundamental dijamin melalui administrasi kependudukan, dan itu lebih dari sekadar masalah teknis pencatatan data. Layanan publik penting seperti

---

[7] Laelasari Ekaningsih, ***Hukum Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Publik di Indonesia*.** (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 84.

[8] Siti Maria Ulfa, ***"Problematika Yuridis Validitas Data Kependudukan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum"***, *Jurnal Hukum dan Regulasi*, Vol. 5, No. 2 (2023), hal. 45.

kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial tidak dapat diakses oleh warga negara yang tidak memiliki identitas hukum yang sah, yang menyebabkan "kematian perdata" Sebagai bagian dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013, negara bertanggung jawab untuk memastikan keamanan hukum melalui penerbitan dokumen kependudukan. Kelurahan adalah bagian dari struktur birokrasi Indonesia yang berhadapan langsung dengan masalah sosial masyarakat. Kinerja aparatur di tingkat paling bawah sangat bergantung pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan nasional. Aparat kelurahan bertindak sebagai pegawai tingkat jalan yang melakukan tugas administratif serta mengajar dan memverifikasi data awal. Database kependudukan nasional (SIAK) sangat bergantung pada input data yang baik dan proses verifikasi di tingkat kelurahan. Selama ini, pola penanganan masalah kependudukan cenderung bersifat kuratif, yaitu penyelesaian masalah setelah konflik atau hambatan terjadi. Peneliti berargumen bahwa paradigma ini harus diubah menjadi pendekatan preventif. Langkah preventif yang dilakukan oleh perangkat kelurahan seperti sosialisasi masif, validasi data berkala, dan layanan jemput bola merupakan alat yang jauh lebih efektif dan efisien untuk meminimalisir risiko hukum Aparat kelurahan dituntut untuk menjadi penggerak aktif yang mampu mengidentifikasi potensi anomali data sejak dini sebelum menjadi sengketa hukum yang kompleks.[9] Dalam perspektif hukum Islam, Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 menyatakan bahwa penguasa harus memberikan hak kepada orang yang memilikinya dan menetapkan hukum dengan cara yang adil. Ini menunjukkan bahwa pelayanan publik adalah bagian dari amanah yang harus ditunaikan secara adil. Dalam konteks ini, "amanah" berarti memastikan bahwa hak identitas setiap warga negara diberikan secara adil.[10] Selain itu, seperti yang

---

[9] Siti Maria Ulfa, ***"Problematika Yuridis Validitas Data Kependudukan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum"*** , ***Jurnal Hukum Kependudukan*****,** Vol. 5, No. 2 (2023), hal. 15-28.

[10] Muhammad Alim, ***Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam.*** (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 201.

disebutkan dalam surah Ali 'Imran ayat 159, metode pelayanan aparat harus mengacu pada prinsip kepemimpinan yang humanis. Allah SWT memberi perintah untuk menjadi lemah lembut, memaafkan, dan mengutamakan musyawarah (syura). Metode komunikatif dan partisipatif ini adalah salah satu cara untuk menerapkan Rahmatan lil Alamin dalam birokrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulisan akan menitikberatkan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut

a. Bagaimana implementasi peran preventif perangkat kelurhan Gedanganak dalam mengatasi kendala administrasi kependudukan sesuai dengan amat undang undang nomor 14 tahun 2013
b. Bagaimana kendala yang dihadapi perangkat Kelurahan Gedanganak dalam melakukan Upaya pencegahan (preventif) terhadap ketidak tertiban administrasi kependudukan?
c. Bagaimana Solusi atas kendala yang dihadapi warga masyarakat Kelurahan Gedanganak ?

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu, menentukan tujuan penelitian sangat penting untuk mengarahkan langkah-langkah penelitian, yang mencakup:

a. Untuk menganalisis pelaksanaan peran preventif perangkat Kelurahan Gedanganak dalam mengatasi kendala administrasi kependudukan guna memastikan

terpenuhinya hak sipil masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor dan efektivitas yang menjadi penghambat perangkat Kelurahan Gedanganak dalam menjalankan fungsi pencegahan terhadap ketidaktertiban data kependudukan.

c. Untuku mengetahui solusi untuk kendala yang dihadapi warga Kelurahan Gedanganak

1.4. Sistematika penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul **"**IMPLEMENTASI KEWENANGAN PERANGKAT KELURAHAN GEDANGANAK KABUPATEN SEMARANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**"**, sistematika penulisan disusun secara sistematis agar pembahasan dapat terarah, runtut, dan mudah dipahami. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan pengantar yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya administrasi kependudukan sebagai bentuk perlindungan hak sipil masyarakat serta urgensi peran preventif perangkat kelurahan dalam mencegah permasalahan administrasi kependudukan. Selanjutnya, bab ini memuat rumusan masalah yang berfokus pada bagaimana implementasi peran preventif perangkat Kelurahan Gedanganak serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Bab ini juga menjelaskan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis pelaksanaan peran preventif dan mengidentifikasi faktor penghambatnya, serta manfaat penelitian baik secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum administrasi negara maupun secara praktis bagi aparatur kelurahan dan masyarakat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan teoritis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan mengenai implementasi peran preventif perangkat kelurahan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dalam konteks hukum di Indonesia, administrasi kependudukan memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh dokumen kependudukan sebagai bentuk pengakuan status hukum dan identitas diri.

BAB III METODE PENELITIAN, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji hukum sebagai norma sekaligus sebagai perilaku sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada bagaimana implementasi peran preventif perangkat kelurahan dalam praktik penyelenggaraan administrasi kependudukan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkaji kesenjangan antara hukum yang tertulis dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

BAB IV HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini menguraikan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan serta pembahasan yang dilakukan secara mendalam berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pada bagian awal, disajikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, yaitu Kelurahan Gedanganak, yang meliputi kondisi geografis, struktur organisasi, serta karakteristik wilayah. Selanjutnya dipaparkan gambaran umum hasil penelitian yang menjelaskan

proses pelaksanaan penelitian, teknik pengumpulan data, serta pihak-pihak yang menjadi informan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN, Bab ini merupakan bagian penutup dari keseluruhan penelitian yang berisi simpulan dan saran. Simpulan disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, yang secara ringkas menjawab rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, disampaikan saran yang ditujukan kepada perangkat kelurahan, pemerintah terkait, serta masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah preventif diartikan sebagai tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu peristiwa yang berpotensi menimbulkan kerugian, seperti pelanggaran hukum, kekacauan administrasi, maupun konflik sosial. Oleh karena itu, dalam rangka mengkaji penerapan peran preventif perangkat Kelurahan Gedanganak dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, diperlukan suatu kajian yang bersifat yuridis dan teoritis secara komprehensif. Penelitian kepustakaan dalam hal ini berfungsi untuk membangun landasan teoritis yang mencakup konsep administrasi kependudukan, peran perangkat kelurahan, teori pencegahan, representasi aktor, serta implementasi kebijakan publik sebagai dasar analisis penelitian. [11]

2.1. Administrasi kependudukan

Administrasi kependudukan merupakan suatu sistem yang mengatur penataan dan penertiban data serta dokumen kependudukan melalui kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Administrasi kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin pengakuan negara terhadap status hukum setiap individu sebagai warga negara. Tanpa adanya administrasi kependudukan yang tertib, maka seseorang berpotensi kehilangan akses terhadap berbagai layanan publik yang menjadi haknya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap penduduk wajib memiliki dokumen kependudukan sebagai bukti identitas yang sah.[12] Dokumen tersebut meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta akta pencatatan sipil. Keberadaan

---

[11] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*****.** edisi terbaru 2023, entri "preventif"; lihat juga Sugiyono, ***Metode Penelitian Kualitatif*****.** (Bandung: Alfabeta, 2022), hal. 54–56

[12] UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

dokumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai identitas administratif, tetapi juga sebagai dasar untuk memperoleh berbagai hak sipil seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam negara hukum, pengakuan terhadap status hukum warga negara merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara.[13]

Selain itu, administrasi kependudukan juga memiliki implikasi hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti dalam bidang hukum perdata, hukum keluarga, hingga hukum waris. Ketidaktertiban administrasi kependudukan dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti sengketa identitas, kesulitan dalam pembuktian hubungan keluarga, serta hambatan dalam memperoleh hak-hak hukum lainnya.[14]
Selain itu, administrasi kependudukan juga memiliki implikasi hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti dalam bidang hukum perdata, hukum keluarga, hingga hukum waris. Ketidaktertiban administrasi kependudukan dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti sengketa identitas, kesulitan dalam pembuktian hubungan keluarga, serta hambatan dalam memperoleh hak-hak hukum lainnya. Dengan demikian, administrasi kependudukan memiliki fungsi strategis dalam menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak masyarakat, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

2.2. Peran dan fungsi perangkat

Kelurahan merupakan unit pemerintahan yang berada di tingkat paling bawah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan daerah,

[13] Jimly Asshiddiqie, ***Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*****,** 2021, hal. 142.
[14] Ridwan HR, ***Hukum Administrasi Negara*****,** 2020, hal. 210.

kelurahan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik, termasuk dalam bidang administrasi kependudukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kelurahan memiliki tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.[15] Dalam hal ini, perangkat kelurahan berperan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di tingkat lokal. Perangkat kelurahan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan edukatif. Aparatur kelurahan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan serta mendorong masyarakat untuk tertib dalam mengurus dokumen kependudukan.

Menurut Agus Dwiyanto, pelayanan publik yang baik harus memenuhi prinsip responsivitas, yaitu kemampuan aparatur dalam memahami dan merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.[16] Dengan demikian, perangkat kelurahan dituntut untuk bersikap aktif dan tidak hanya menunggu masyarakat datang untuk mengurus administrasi. Selain itu, peran perangkat kelurahan juga mencakup fungsi koordinasi dengan berbagai pihak, seperti RT/RW dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa data kependudukan yang dimiliki pemerintah akurat dan mutakhir.

2.3. Konsep peran preventif dan hukum administrasi

Dalam hukum administrasi negara, tindakan preventif merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran

---

[15] UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[16] Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik*, 2021, hal. 45.

sebelum muncul sengketa hukum. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menghindari kerugian melalui mekanisme pengawasan dan pembinaan.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum preventif merupakan upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui pemberian arahan dan pembinaan kepada masyarakat.[17] Dengan demikian, tindakan preventif memiliki peran penting dalam menciptakan tertib hukum. Dalam konteks administrasi kependudukan, peran preventif dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi kepada masyarakat, pendataan awal, validasi data, serta pelayanan jemput bola. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat telah memenuhi kewajiban administratifnya sebelum timbul permasalahan hukum.

Selain itu, tindakan preventif juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan, karena tanpa adanya kesadaran, masyarakat cenderung tidak patuh terhadap aturan yang berlaku.[18] Dengan demikian, peran preventif dalam administrasi kependudukan memiliki fungsi strategis dalam mencegah terjadinya pelanggaran serta menciptakan tertib administrasi.

2.4. Keterwakilan pihak dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan

Administrasi kependudukan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Sinergi antara berbagai pihak tersebut sangat penting untuk mencapai keberhasilan pelayanan publik. Menurut Agus

[17] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, 2020, hal. 25.
[18] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 2020.

Dwiyanto, keberhasilan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh koordinasi antaraktor serta partisipasi masyarakat.[19]

Tanpa adanya kerja sama yang baik, maka pelayanan publik tidak akan berjalan secara optimal. Dalam konteks ini, RT/RW memiliki peran penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. RT/RW bertugas menyampaikan informasi serta membantu pemerintah dalam pendataan kependudukan. Namun demikian, efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada komunikasi yang dilakukan. Dengan demikian, keterlibatan berbagai pihak harus dilakukan secara sinergis agar administrasi kependudukan dapat berjalan dengan baik.

2.5. Pelayanan public implementasi kebijakan

Administrasi kependudukan merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menegaskan bahwa pelayanan publik harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.[20]

Dalam teori implementasi kebijakan, Mazmanian dan Sabatier menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, kemampuan aparatur, serta kondisi masyarakat.[21]

Dalam penelitian ini, perangkat kelurahan berperan sebagai pelaksana kebijakan, sedangkan masyarakat sebagai objek kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada hubungan antara kedua pihak tersebut.

---

[19] Agus Dwiyanto, hal 56.
[20] UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
[21] Mazmanian & Sabatier, *Implementation and Public Policy*, hal. 20.

2.6. Penelitian terdahulu yang relevan

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa administrasi kependudukan masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sosialisasi.

Selain itu, peran aparatur pemerintah masih cenderung administratif dan belum optimal dalam fungsi preventif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan.

2.7. Kesadaran hukum Masyarakat

Kesadaran hukum merupakan kondisi dimana masyarakat memahami, menghayati, dan mematuhi hukum secara sukarela. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum.[22]

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama dalam ketidaktertiban administrasi kependudukan.

2.8. Efektivitas hukum dalam Masyarakat

Efektivitas hukum menunjukkan sejauh mana hukum dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya.[23]

Dalam konteks penelitian ini, faktor masyarakat menjadi dominan karena rendahnya kesadaran hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukumnya, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan mematuhi aturan

---

[22] Soerjono Soekanto, hal. 50.
[23] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2020.

tersebut.[24]

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, budaya hukum, serta minimnya sosialisasi dari aparat penegak hukum maupun pemerintah. Ketika masyarakat tidak memahami pentingnya hukum, maka kecenderungan untuk melanggar aturan akan semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan penyuluhan hukum secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara.[25]

2.9. Konsep pelayanan publik yang responsif

Pelayanan publik yang responsif merupakan pelayanan yang mampu memahami kebutuhan masyarakat dan memberikan solusi yang tepat.[26] Pelayanan tidak hanya bersifat pasif, tetapi harus proaktif, seperti melalui pelayanan jemput bola. Dalam praktiknya, pendekatan ini menuntut aparatur pemerintah untuk lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat, termasuk kelompok rentan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan publik. Selain itu, pelayanan yang responsif juga ditandai dengan kecepatan dan ketepatan dalam menanggapi setiap permohonan maupun keluhan masyarakat. Aparatur tidak hanya berfokus pada penyelesaian administrasi semata, tetapi juga harus mampu memberikan informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.[27]

---

[24] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 8.
[25] Achmad Ali, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 78.
[26] Agus Dwiyanto, hal. 78.
[27] Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 55.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) yang dipadukan dengan metode deskriptif kualitatif. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada karakter permasalahan yang tidak hanya berkaitan dengan norma hukum yang berlaku, tetapi juga menyangkut realitas sosial dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, kajian difokuskan pada peran preventif perangkat kelurahan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mencakup dimensi hukum secara normatif sekaligus praktik sosial serta dinamika birokrasi di tingkat kelurahan.[28] Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) yang dikombinasikan dengan metode deskriptif kualitatif. Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada objek kajian yang tidak hanya menitikberatkan pada aturan hukum secara normatif, tetapi juga pada implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Fokus penelitian ini adalah peran preventif perangkat kelurahan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, yang mencakup aspek hukum, kondisi sosial masyarakat, serta praktik penyelenggaraan birokrasi di tingkat kelurahan. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif antara ketentuan hukum dan realitas empiris di lapangan.[29]

Mengingat administrasi kependudukan merupakan bagian dari pelayanan publik yang melibatkan interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat, maka penggunaan pendekatan yuridis sosiologis menjadi sangat tepat. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya berfokus pada norma hukum, tetapi juga menelaah kondisi empiris di lapangan, seperti pola pelayanan, bentuk sosialisasi kepada

---

[28] Bambang Sunggono, ***Metodologi Penelitian Hukum*.** (Jakarta: Rajawali Pers, edisi revisi 2022), hal. 42–44
[29] Bambang Sunggono, ***Metodologi Penelitian Hukum*.** (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hal. 43–45

masyarakat, serta praktik pencegahan terhadap permasalahan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menguraikan secara sistematis dan mendalam mengenai peran preventif perangkat kelurahan, berbagai kendala yang dihadapi, serta respons masyarakat terhadap pelaksanaan peran tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses, makna, dan pola perilaku aparatur serta masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.[30] Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial berdasarkan perspektif subjek penelitian, dengan memanfaatkan data yang bersumber dari kata-kata, tindakan, serta dokumen. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami secara komprehensif berbagai aspek yang diteliti, antara lain.[31]

Dalam penelitian ini, perangkat kelurahan menjalankan berbagai fungsi preventif yang diwujudkan melalui kegiatan seperti sosialisasi kepada masyarakat, pendataan awal penduduk, serta pelayanan jemput bola guna mempermudah akses administrasi kependudukan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan baik yang bersifat internal, seperti keterbatasan sumber daya aparatur, maupun eksternal, seperti rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan deskriptif-analitis dalam kerangka penelitian kualitatif menjadi relevan, karena mampu menggambarkan fakta empiris di lapangan sekaligus menganalisis keterkaitan antara ketentuan hukum dengan praktik yang terjadi. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk

---

[30] Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum*.** (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal. 51–53

[31] Lexy J. Moleong, ***Metodologi Penelitian Kualitatif*.** (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hal. 4–6.

membandingkan antara norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dengan implementasinya dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan.[32] Dan keadaan nyata dikelurahan Gedanganak

Teori perlindungan hukum turut memperkuat penggunaan pendekatan dalam penelitian ini, yang membedakan antara upaya represif dan preventif dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan hukum represif diwujudkan melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum preventif dilakukan melalui upaya pencegahan, seperti penyusunan aturan, pembinaan, dan pemberian pedoman yang jelas. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan memberikan batasan serta arahan yang jelas bagi masyarakat maupun aparatur. Dalam konteks penelitian ini, peran preventif perangkat kelurahan dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum yang bertujuan menghindarkan masyarakat dari permasalahan yang timbul akibat ketidaktertiban administrasi kependudukan.[33] Selain itu, pendekatan dalam penelitian ini juga dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan publik sebagai landasan analisis. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti kejelasan norma hukum yang menjadi dasar kebijakan, kapasitas aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya, serta kondisi sosial masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan yuridis sosiologis yang dipadukan dengan metode deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana perangkat kelurahan sebagai pelaksana kebijakan mampu

---

[32] Sugiyono, ***Metode Penelitian Kualitatif.*** (Bandung: Alfabeta, 2022), hal. 12–14

[33] Philipus M. Hadjon, ***Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia.*** (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, edisi terbaru 2021), hal. 29–31

menjalankan fungsi preventifnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dalam konteks kehidupan sosial masyarakat setempat.[34]

Dengan demikian, rumusan masalah penelitian dapat dijawab dengan benar dengan menggabungkan pendekatan yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif:

Bagaimana perangkat kelurahan membantu menjaga kependudukan, Seberapa baik peran ini dalam mencegah masalah administrasi kependudukan, Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan peran preventif tersebut. Diharapkan bahwa metode ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang hubungan antara standar hukum administrasi kependudukan dengan praktik penyelenggaraan di tingkat kelurahan. Selain itu, itu juga dapat memberikan saran yang didasarkan pada situasi nyata.

3.2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal research*) dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*law in action*). Oleh karena itu, pendekatan yuridis sosiologis dipilih untuk mengkaji keterkaitan antara aturan hukum dengan realitas sosial. Sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto, penelitian hukum sosiologis bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas hukum dalam masyarakat serta memahami hubungan antara hukum dengan faktor-faktor sosial yang memengaruhinya.[35] Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam bagaimana perangkat Kelurahan

---

[34] Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, ***Implementation and Public Policy*.** (Berkeley: University of California Press, edisi terbaru 2021), hal. 20–25

[35] Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum*.** (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal. 52–54

Gedanganak menjalankan peran preventif dalam administrasi kependudukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Penelitian ini tidak hanya memberikan penjelasan tentang fakta empiris, tetapi juga menganalisis kesesuaian antara norma hukum dengan praktik pelayanan publik di tingkat kelurahan.[36] Penelitian ini difokuskan pada upaya untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pencegahan. Aspek ini menjadi penting karena, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah timbulnya sengketa atau pelanggaran hukum sebelum diterapkannya tindakan represif. Dalam konteks administrasi kependudukan, fungsi preventif tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi kepada masyarakat, pendataan awal, validasi data kependudukan, serta penyelenggaraan layanan jemput bola guna memastikan tertib administrasi sejak dini.[37] Dengan demikian, penelitian ini mengintegrasikan kajian hukum administrasi negara dengan praktik penyelenggaraan pelayanan publik di lapangan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana perangkat kelurahan berperan dalam menjamin dan melindungi hak masyarakat atas identitas hukum melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib dan efektif.[38]

3.3. Metode pengumpulan sampel (subjek penelitian)

Dalam penelitian ini, teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik ini dipilih karena tidak seluruh anggota populasi memiliki

---

[36] Laelasari Ekaningsih, ***Hukum Administrasi Kependudukan: Transformasi Pelayanan Publik di Indonesia.*** (Semarang: Unissula Press, 2021), hlm. 104.
[37] Philipus M. Hadjon, ***Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia.*** (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, edisi 2021), hal. 29–32
[38] Philipus M. Hadjon, ***Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia.*** (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), hal. 35–37

keterlibatan langsung maupun pemahaman yang memadai terkait administrasi kependudukan. Oleh sebab itu, peneliti hanya memilih subjek tertentu yang dinilai memiliki pengetahuan serta pengalaman yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, purposive sampling digunakan ketika peneliti memerlukan informan yang dianggap paling memahami objek penelitian secara mendalam. Adapun subjek dalam penelitian ini meliputi:[39]

a) Lurah Kelurahan Gedanganak/ pihak terkait
b) Perangkat kelurahan yang menangani administrasi kependudukan.
c) Masyarakat kelurahan gedanganak

Pemilihan subjek tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam dan komprehensif mengenai:

a. Implementasi peran preventif perangkat kelurahan.
b. Kendala administratif dan sosial dalam pelayanan kependudukan.
c. Tingkat kesadaran hukum masyarakat.

3.4. Metode pengumpulan data

a. Wawancara dilakukan secara trusktur semi trusuktur kepada perangkat kelurahan gedang anak dan masyarakat.

A. Bentuk peran preventif perangkat kelurahan.
B. Mekanisme pelayanan administrasi kependudukan.
C. Hambatan dalam pelaksanaan pelayanan.

---

[39] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ***Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*****.** (Jakarta: Rajawali Pers, edisi terbaru 2021), hal. 54–56

D. Strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

wawancara merupakan teknik utama dalam penelitian hukum empiris untuk mengetahui sikap dan perilaku hukum aparat serta masyarakat.

b. Observasi dilakukan secara langsung di Kantor Kelurahan Gedanganak dan lingkungan masyarakat. Observasi ini mencakup:

    a. Proses layanan dokumen kependuduk
    b. Interaksi antara apparat kelurahan dan Masyarakat
    c. Kegiatan sosialisasi dan pendataan

Dalam penelitian ini, teknik observasi digunakan untuk memverifikasi kesesuaian antara data yang diperoleh melalui wawancara dengan kondisi faktual di lapangan. Penggunaan observasi ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak hanya bersifat subjektif, tetapi juga sesuai dengan realitas empiris. Sejalan dengan pandangan Agus Dwiyanto, kualitas pelayanan publik tidak cukup dinilai dari aspek formal atau prosedural saja, melainkan harus dilihat melalui praktik nyata yang terjadi di lapangan.[40]

c. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu tentang:

    a. Administrasi kependudukan
    b. Hukum administrasi negara
    c. Pelayanan public
    d. Implementasi kebijakan
    e. Perlindungan hukum preventif

[40] Agus Dwiyanto, ***Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*.** (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, edisi terbaru 2021), hal. 96–98

Dalam penelitian ini, studi kepustakaan digunakan untuk menyusun landasan teoritis yang berfungsi sebagai acuan dalam menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Melalui penelusuran berbagai literatur, baik berupa buku, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan, peneliti dapat membangun kerangka berpikir yang sistematis guna mendukung proses analisis empiris.

3.5. Bahan hukum

1. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif karena ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dalam pembentukan hukum. Sumber ini memiliki kekuatan mengikat sehingga menjadi dasar utama dalam menentukan keberlakuan suatu norma hukum di masyarakat. Bahan hukum primer umumnya meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara yang berkaitan dengan proses pembentukan hukum. Dalam penelitian hukum, bahan hukum primer digunakan sebagai rujukan utama untuk menganalisis norma hukum secara langsung karena merupakan sumber pokok dalam kajian hukum.[41]

   Secara umum, contoh bahan hukum primer yang sering digunakan dalam penelitian hukum antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam konteks penelitian mengenai administrasi kependudukan, misalnya, bahan hukum primer yang dapat digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

---

[41] Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum*.** (Jakarta: Kencana, edisi terbaru 2021), hal. 141–143

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
g) Peraturan daerah kabupaten semarang nomor 7 tahun 2016 tentang perubahan atas perda nomor 7 tahun 2009.

2. Bahan hukum sekunder merupakan sumber pendukung dalam penelitian hukum yang berasal dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta karya tulis para sarjana, ahli, maupun akademisi di bidang hukum. Penggunaan bahan hukum sekunder sudah menjadi hal yang lazim dalam setiap penelitian, karena berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Dengan demikian, bahan hukum sekunder dapat dipahami sebagai rujukan yang bersumber dari pemikiran para ahli yang memiliki kompetensi di bidang hukum guna memperkuat kajian dalam penelitian.[42] Berdasarkan uraian diatas bahan hukum skunder akan menitik beratkan pada

    a. Perlindungan hukum bagi rakyat

[42] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 155–157

b. Manajemen pelanayan publik

c. Jurnal tentang administrasi dan pelayanan publik

Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur kepada perangkat Kelurahan Gedanganak, dan masyarakat.

a. Bentuk peran preventif peran kelurahan.

b. Mekanisme pelayanan administrasi kependudukan.

c. Hambatan dalam pelaksanaan pelayanan.

d. Strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

3. Dalam penelitian hukum empiris, teknik wawancara memiliki peranan yang sangat penting sebagai sarana untuk memperoleh informasi secara langsung dari subjek penelitian. Melalui wawancara, peneliti dapat memahami sikap, pandangan, serta perilaku hukum baik dari aparatur maupun masyarakat dalam praktiknya. Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto, wawancara merupakan salah satu metode utama yang digunakan untuk menggali data mengenai bagaimana hukum dijalankan dan dipahami oleh para pelaku hukum di masyarakat.[43]

Observasi dilakukan secara langsung di Kantor Kelurahan Gedanganak dan lingkungan masyarakat. Observasi ini mencakup:

A. Proses layanan dokumen kependudukan

B. Interaksi antara apparat kelurahan dan Masyarakat

C. Kegiatan sosialisasi dan pendataan

[43] Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum.*** (Jakarta: Rajawali Pers, edisi terbaru 2021), hal. 57–59

Dalam penelitian ini, observasi digunakan sebagai teknik untuk memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh melalui wawancara dengan kondisi nyata di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat memverifikasi apakah informasi yang disampaikan oleh informan mencerminkan praktik yang sebenarnya. Sejalan dengan pandangan Agus Dwiyanto, kualitas pelayanan publik tidak hanya dapat dinilai dari aspek normatif atau prosedural, tetapi harus dilihat secara langsung melalui praktik yang berlangsung di lapangan.[44] Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu tentang:

a. Administrasi kependudukan
b. Hukum administrasi negara
c. Pelayanan publik
d. Implementasi kebijakan
e. Perlindungan hukum preventif

Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dimanfaatkan untuk menyusun kerangka teoritis yang berfungsi sebagai landasan dalam menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Melalui penelaahan berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan, peneliti dapat membangun dasar konseptual yang sistematis guna mendukung proses analisis empiris.[45]

---

[44] Agus Dwiyanto, ***Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*.** (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), hal. 97–99
[45] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hal. 54–56

4. Metode analisis data

Metetode analisi data menggunakan metode kualitatif tahap analisis meliputi

a. Pengumpulan data
b. Reduksi data
c. Penyajian data
d. Penarikan Kesimpulan

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dengan kondisi empiris yang terjadi di Kelurahan Gedanganak. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas hukum dalam praktik. Efektivitas hukum sendiri dapat dimaknai sebagai keadaan yang menunjukkan sejauh mana suatu aturan hukum mampu dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat. Suatu hukum dikatakan efektif apabila norma yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara nyata serta mampu mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pembentuk hukum. Dengan demikian, efektivitas hukum berkaitan erat dengan keberhasilan suatu peraturan dalam menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.[46]

Efektivitas hukum tidak semata-mata ditentukan oleh adanya peraturan perundang-undangan, melainkan juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa keberhasilan penerapan hukum dalam masyarakat ditentukan oleh lima faktor

[46] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal. 8–11

utama, yaitu faktor hukumnya itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Kelima unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menilai apakah suatu ketentuan hukum dapat berjalan secara efektif dalam praktik kehidupan masyarakat.[47]

[47] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal. 8–11

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kelurahan gedanganak

Kelurahan Gedanganak merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kelurahan Gedanganak memiliki posisi yang cukup strategis karena berada di kawasan yang berkembang, baik dari segi pemukiman maupun aktivitas ekonomi masyarakat. Gedanganak adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dengan luas wilayah sekitar 1,85 km² dan kode pos 50519.[48] Berikut adalah struktur organisasi kelurahan gedang anak, guna melengkapi data penelitian penulis.

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN GEDANG ANAK	
Lurah	Yunianto, S.H., M.A.
Sekertaris Kelurahan	Thaha Ifan Riyadi, S.E.
Kasi tata pembangunan	Sri Wahyuningsih, S.H.
Kasi ketentraman dan pemerintahan	Nurul Aeni, S.E.
Kasi kesejahteraan Ketertiban Masyarakat Rakyat	Sri Wahyuningsih, S.H.
Staf 1	Mohammad Hanafi
Staf 2	Abdul Kholiq

SUMBER KELURAHAN GEDANGANAK 2026

4.2. Gambaran umum hasil penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang pada tanggal 2 April sampai dengan 9 April 2026. Teknik

[48] Muqodas, A., Priyono, H. K. D., & H Muhammad Musiyam, M. T. P. (2015). ***Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Ungaran Barat Dan Kecamatan Ungaran Timur Pasca Pemekaran Wilayah Tahun 2007 Dan 2011*** (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab III. Informan dalam penelitian ini meliputi Lurah Kelurahan Gedanganak, perangkat kelurahan yang menangani administrasi kependudukan, serta masyarakat. Wawancara dilakukan dengan Bapak Yunianto, S.H., M.A. selaku Lurah, Ibu Sri Wahyuningsih selaku perangkat kelurahan, Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat, salah satunya Bapak Mubaid (65 tahun), seorang pedagang kaki lima yang berdomisili di RT 01 RW 02. Ibu Hijrotun Nafi'ah (31 tahun), Seorang pedagang warung makan yang berdomisili Perum griya cendana blok C no.25 RT 03 RW 10 gedanganak ungaran timur, dan Ibu Ester Kuswati seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di Perum griya cendana blok C RT 03 RW 10 gedanganak ungaran timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perangkat kelurahan telah menjalankan fungsi administratif dan preventif dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Namun, secara empiris masih ditemukan adanya kesenjangan antara pelaksanaan kebijakan dengan kondisi nyata di masyarakat.[49]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perangkat kelurahan telah menjalankan fungsi administratif dan preventif dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Namun, secara empiris masih ditemukan adanya kesenjangan antara pelaksanaan kebijakan dengan kondisi nyata di masyarakat.

4.3.Pembahasan berdasarkan rumusan masalah

A. Implementasi Peran Preventif Perangkat Kelurahan dalam Memastikan Tertib Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa

[49] Madjid, U. (2024). Quality of public services: The role of state civil apparatus in realizing good governance. *Journal of ecohumanism*, *3*(7).

upaya yang dilakukan oleh perangkat Kelurahan Gedanganak dalam memastikan masyarakat mengurus administrasi kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran dilakukan melalui mekanisme penerimaan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang kemudian disampaikan kepada pemangku wilayah yaitu RT/RW.

Mekanisme ini menunjukkan bahwa pola implementasi kebijakan yang digunakan bersifat struktural dan berjenjang. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan publik menurut Mazmanian dan Sabatier, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kejelasan komunikasi antar pelaksana kebijakan serta konsistensi dalam pelaksanaan. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, mekanisme tersebut belum sepenuhnya efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk mengurus dokumen kependudukan secara mandiri. Dengan kata lain, fungsi preventif yang dijalankan masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, peran RT/RW sebagai ujung tombak di tingkat masyarakat belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kapasitas dan intensitas komunikasi dengan warga.

B. Upaya Preventif dalam Mencegah Keterlambatan dan Kesalahan Administrasi Kependudukan

Upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Gedanganak dalam mencegah keterlambatan dan kesalahan administrasi adalah dengan segera menginformasikan kepada RT/RW apabila terdapat data kependudukan yang belum sesuai. Langkah ini merupakan bentuk pengawasan administratif awal yang sejalan dengan konsep perlindungan hukum preventif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran sebelum terjadi. Namun dalam

praktiknya, langkah tersebut masih bersifat pasif karena hanya mengandalkan penyampaian informasi tanpa adanya tindak lanjut yang sistematis seperti verifikasi langsung ke lapangan atau pendampingan kepada masyarakat. Akibatnya, potensi kesalahan data dan keterlambatan pengurusan dokumen masih tetap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi preventif belum berjalan secara maksimal.

C. Pelaksanaan Sosialisasi Administrasi Kependudukan

Berdasarkan hasil wawancara, sosialisasi yang dilakukan oleh Kelurahan Gedanganak dilakukan melalui pemberitahuan tertulis kepada RT/RW. Meskipun langkah ini menunjukkan adanya upaya penyampaian informasi, namun efektivitasnya masih terbatas. Hal ini disebabkan karena tidak semua masyarakat mendapatkan informasi tersebut secara langsung.

Dalam teori pelayanan publik, sosialisasi yang efektif seharusnya dilakukan secara langsung dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat memahami secara utuh pentingnya administrasi kependudukan. Dengan demikian, metode sosialisasi yang masih bersifat satu arah menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat.

D. Kendala yang Dihadapi Kelurahan dalam Mewujudkan Tertib Administrasi

Kendala utama yang dihadapi oleh Kelurahan Gedanganak adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Mubaid yang menyatakan bahwa dirinya enggan mengurus KTP yang hilang karena merasa tidak ada manfaatnya. Ia juga menyampaikan bahwa selama hidupnya tidak pernah mendapatkan bantuan sosial, sehingga beranggapan bahwa administrasi kependudukan tidak memiliki nilai guna.

Pandangan tersebut menunjukkan adanya persoalan yang lebih kompleks, yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai lemahnya legitimasi pelayanan publik. Selain itu, persepsi masyarakat bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada kelompok tertentu juga menjadi faktor yang memperkuat sikap apatis.

E. Upaya Kelurahan dalam Mengatasi Kendala

Upaya yang dilakukan oleh kelurahan selama ini adalah dengan menginformasikan kembali kepada RT/RW. Namun, upaya tersebut masih belum cukup efektif karena tidak disertai dengan pendekatan langsung kepada masyarakat. Dalam teori pelayanan publik, efektivitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara aparatur dan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih aktif dan persuasif agar masyarakat memiliki kesadaran dan kepercayaan terhadap pentingnya administrasi kependudukan.

4.4. Analisis kesenjangan antara norma dan realitas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap warga negara berhak dan wajib memiliki dokumen kependudukan. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat masyarakat yang belum memenuhi kewajiban tersebut.[50] Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan realitas di lapangan (das sein). Kesenjangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

[50] Mala, M. (2021). ***Pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*** (Disertasi Doktor, Universitas Lancang Kuning).

a) Kurangnya sosialilasi

Kurangnya sosialisasi dalam administrasi kependudukan dapat diartikan sebagai belum optimalnya penyampaian informasi, edukasi, dan pemahaman dari pemerintah kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan serta prosedur pengurusannya. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui atau tidak memahami kewajiban administratifnya, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum.[51] Kurangnya sosialisasi juga menunjukkan lemahnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana informasi yang disampaikan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Akibatnya, kebijakan yang telah ditetapkan tidak dapat diimplementasikan secara optimal di lapangan.[52]

b) Rendahnya kesadaran masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam administrasi kependudukan dapat diartikan sebagai kondisi dimana masyarakat belum memahami, menyadari, dan mematuhi pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran.[53] Hal ini ditandai dengan sikap acuh, menunda, atau bahkan mengabaikan kewajiban administratif karena dianggap tidak memiliki manfaat langsung.[54] Rendahnya kesadaran masyarakat umumnya dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan, minimnya sosialisasi, serta pengalaman sosial yang menyebabkan masyarakat tidak

---

[51] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 112.
[52] Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), hlm. 45.
[53] Rahmadani, R. (2025). *Perspektif siyasah idariyah tentang kesadaran hukum masyarakat dalam mengurus akta kelahiran di Kampung Pulau Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).
[54] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 8–10.

merasakan manfaat dari kebijakan pemerintah. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan administrasi kependudukan serta terhambatnya pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai warga negara.[55]

c) lemahnya pengawasan a

Lemahnya pengawasan dalam administrasi kependudukan dapat diartikan sebagai belum optimalnya fungsi pemantauan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan administrasi kependudukan di masyarakat.[56] Pengawasan yang seharusnya menjadi instrumen penting dalam memastikan tertib administrasi belum berjalan secara efektif, sehingga masih ditemukan masyarakat yang belum memiliki atau belum mengurus dokumen kependudukan secara tepat waktu.[57] Kondisi ini dapat dilihat dari kurangnya monitoring langsung ke masyarakat, minimnya evaluasi berkala terhadap data kependudukan, serta terbatasnya tindak lanjut terhadap warga yang belum tertib administrasi.[58] Dalam praktiknya, pengawasan yang dilakukan cenderung bersifat administratif, seperti hanya menyampaikan data kepada RT/RW tanpa disertai dengan pengawasan lapangan yang intensif dan berkelanjutan.[59] Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengawasan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Lemahnya pengawasan dapat mengakibatkan tidak efektifnya implementasi kebijakan serta membuka peluang terjadinya kesalahan data dan

---

[55] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 117.
[56] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 210.
[57] Ibid., hlm. 211.
[58] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 9.
[59] Ibid., hlm. 10.

ketidaktertiban administrasi.[60] Selain itu, lemahnya pengawasan juga berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat, karena tidak adanya kontrol dan dorongan yang kuat dari pemerintah. Akibatnya, masyarakat cenderung mengabaikan kewajiban administratif, sehingga tujuan tertib administrasi kependudukan sulit untuk tercapai secara optimal.[61] Dengan demikian, lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor penghambat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, sehingga diperlukan penguatan sistem pengawasan yang lebih aktif, terstruktur, dan berkelanjutan.[62]

d) kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat diartikan sebagai kondisi dimana masyarakat merasa bahwa kebijakan dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah belum memberikan manfaat secara nyata, adil, dan merata. Kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung bersikap apatis, kurang percaya terhadap program pemerintah, serta enggan berpartisipasi dalam kegiatan administrasi kependudukan.[63] Dalam konteks administrasi kependudukan, rendahnya kepercayaan masyarakat dapat dipengaruhi oleh pengalaman sosial, seperti tidak pernah mendapatkan bantuan sosial atau merasa adanya ketidakadilan dalam pelayanan publik. Persepsi tersebut menimbulkan anggapan bahwa dokumen kependudukan tidak memiliki manfaat langsung bagi kehidupan mereka, sehingga masyarakat menjadi tidak terdorong untuk mengurusnya.[64] Selain itu, kurangnya transparansi dan komunikasi dari pemerintah juga dapat memperkuat

---

[60] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 212.
[61] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 8.
[62] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 214.
[63] Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), hlm. 47.
[64] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 113.

rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat. Hal ini berdampak pada rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban administratif serta tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan di lapangan.[65]

4.5. Analisis persepektif hukum admministrasi negara

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Perlindungan hukum preventif harus diwujudkan melalui:

a. Sosialisasi

Dalam konteks penyelenggaraan administrasi kependudukan, sosialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi, edukasi, dan pemahaman oleh pemerintah (dalam hal ini kelurahan) kepada masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan, prosedur pengurusan dokumen, serta hak dan kewajiban warga negara agar tercipta kesadaran hukum dan kepatuhan administratif. Secara umum, sosialisasi merupakan proses dimana individu atau kelompok masyarakat mempelajari, memahami, dan menginternalisasi nilai, norma, serta aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks hukum administrasi negara, sosialisasi menjadi bagian penting dari upaya preventif pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau ketidaktertiban administrasi sebelum terjadi masalah hukum.

Sosialisasi merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam sistem sosial. Dalam kaitannya dengan administrasi kependudukan, sosialisasi bertujuan untuk membentuk kesadaran masyarakat agar memahami pentingnya identitas hukum

[65] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 214.

sebagai warga negara.[66] dalam pelayanan publik, sosialisasi merupakan bagian dari komunikasi kebijakan yang bertujuan untuk memastikan masyarakat mengetahui, memahami, dan dapat mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintah secara efektif. Dengan demikian, sosialisasi dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai penyampaian informasi secara satu arah, tetapi juga sebagai proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat yang bertujuan membangun kesadaran, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan. Apabila dikaitkan dengan peran preventif, sosialisasi memiliki fungsi strategis sebagai langkah awal dalam mencegah terjadinya ketidaktertiban administrasi. Melalui sosialisasi yang efektif, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui kewajiban administratifnya, tetapi juga memahami manfaat konkret dari kepemilikan dokumen kependudukan, seperti akses terhadap pelayanan publik, bantuan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan. Namun, berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Gedanganak, sosialisasi yang dilakukan masih bersifat administratif melalui pemberitahuan kepada RT/RW, sehingga belum sepenuhnya mampu membangun kesadaran masyarakat secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perlu dilakukan secara lebih aktif, langsung, dan berkelanjutan agar fungsi preventif dalam administrasi kependudukan dapat berjalan optimal.

b. Edukasi

Dalam konteks penyelenggaraan administrasi kependudukan, edukasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya perangkat kelurahan, dalam memberikan pemahaman, pengetahuan, serta pembentukan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya administrasi

[66] Soerjono Soekanto, (***Sosiologi Suatu Pengantar)***, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 112.

kependudukan.[67] Edukasi tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi semata, tetapi juga mencakup upaya sistematis untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat agar memiliki kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap kewajiban administratif sebagai warga negara. Secara konseptual, edukasi merupakan bagian dari proses pembelajaran sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dari segi pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), maupun perilaku (psikomotorik). Dalam perspektif hukum administrasi negara, edukasi memiliki peran strategis sebagai instrumen preventif, yaitu sebagai sarana untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau ketidaktertiban sebelum muncul permasalahan hukum. Dengan kata lain, edukasi merupakan bentuk perlindungan hukum tidak langsung yang dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat.

kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum itu sendiri. Edukasi hukum menjadi sarana penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami makna dan tujuan dari aturan tersebut sehingga tumbuh kepatuhan secara sukarela.[68] Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, edukasi menjadi penting agar masyarakat memahami bahwa hukum, termasuk dalam hal administrasi kependudukan, hadir untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan mereka sebagai warga negara.[69] Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pengawasan yang dilakukan oleh Kelurahan Gedanganak

---

[67] KAMALUDIN, M. R. (2025). *STRATEGI KOMUNIKASI EDUKASI DALAM OPTIMALISASI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI APLIKASI SI D'NOK DI KOTA SEMARANG* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

[68] Soerjono Soekanto, ***(Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum).*** (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 50–52.

[69] Satjipto Rahardjo, ***(Ilmu Hukum*)**. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 117–120.

terlihat melalui mekanisme koordinasi dengan RT/RW dalam memantau data kependudukan masyarakat. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara menerima data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), kemudian menyampaikannya kepada pemangku wilayah untuk ditindaklanjuti.Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, pengawasan yang dilakukan masih bersifat administratif dan belum menyentuh secara langsung kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari belum adanya monitoring lapangan secara intensif maupun evaluasi berkala terhadap warga yang belum memiliki dokumen kependudukan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengawasan yang efektif seharusnya mencakup dua bentuk, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya melalui sosialisasi dan edukasi, sedangkan pengawasan represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, misalnya melalui penindakan atau koreksi administratif. Dalam konteks administrasi kependudukan, pengawasan preventif menjadi sangat penting karena dapat mencegah terjadinya ketidaktertiban sejak awal. Dengan adanya pengawasan yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa masyarakat mengurus dokumen kependudukan secara tepat waktu dan sesuai prosedur. Namun, apabila pengawasan tidak dilakukan secara optimal, maka akan muncul berbagai permasalahan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterlambatan pengurusan dokumen, serta ketidakakuratan data kependudukan. Hal ini pada akhirnya dapat berdampak pada terhambatnya pelayanan publik dan tidak optimalnya pemenuhan hak-hak masyarakat.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara menyeluruh.

c. Pengawasan

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pelayanan dan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[70] Pengawasan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan mengontrol atau memeriksa, tetapi juga sebagai suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menjamin tercapainya tujuan pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel.[71] Secara konseptual, pengawasan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi pemantauan, penilaian, pemeriksaan, serta tindakan korektif terhadap suatu kegiatan atau kebijakan yang dilaksanakan oleh aparatur negara. Dalam konteks hukum administrasi negara, pengawasan memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, serta ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan norma hukum yang telah ditetapkan.

pengawasan dalam hukum administrasi negara merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum, serta untuk mencegah dan menindak penyimpangan yang

---

[70] Anggraini, M. D., & Manar, D. G. (2025). Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui SistemInformasi Administrasi Kependudukan (SIAK)(Studi Penelitian Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, *14*(2), 1380-1395.

[71] Anggraini, M. D., & Manar, D. G. (2025). Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui SistemInformasi Administrasi Kependudukan (SIAK)(Studi Penelitian Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, *14*(2), 1380-1395.

mungkin terjadi dalam pelaksanaan kewenangan oleh aparatur negara.[72] keberhasilan suatu aturan hukum sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan dalam pelaksanaannya. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, hukum hanya akan menjadi norma tertulis yang tidak memiliki kekuatan dalam mengatur perilaku masyarakat.[73]

Dalam perspektif yang lebih luas, pengawasan juga berkaitan erat dengan prinsip *good governance*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban administratif, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks penelitian ini, pengawasan yang dilakukan oleh Kelurahan Gedanganak terlihat melalui mekanisme koordinasi dengan RT/RW sebagai pemangku wilayah. Data kependudukan yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) disampaikan kepada RT/RW untuk kemudian ditindaklanjuti kepada masyarakat. Mekanisme ini menunjukkan adanya bentuk pengawasan tidak langsung yang dilakukan melalui struktur pemerintahan di tingkat bawah. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, pengawasan yang dilakukan masih bersifat administratif dan belum optimal. Hal ini ditandai dengan belum adanya monitoring lapangan secara intensif serta kurangnya evaluasi berkala terhadap masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan. Kondisi ini menyebabkan masih adanya masyarakat yang tidak tertib administrasi, sebagaimana terlihat dalam kasus Bapak Mubaid. Dalam teori hukum administrasi negara, pengawasan dapat dibedakan menjadi dua bentuk,

---

[72] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 210–212.
[73] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 8–10.

yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan, misalnya melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat. Sedangkan pengawasan represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, misalnya melalui tindakan koreksi atau penegakan hukum administratif. Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, pengawasan preventif memiliki peran yang sangat penting karena dapat mencegah terjadinya ketidaktertiban sejak awal.[74] Dengan adanya pengawasan yang efektif, pemerintah dapat memastikan bahwa masyarakat mengurus dokumen kependudukan secara tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebaliknya, apabila pengawasan tidak berjalan dengan baik, maka akan muncul berbagai permasalahan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterlambatan pengurusan dokumen, serta ketidakakuratan data kependudukan. Hal ini pada akhirnya dapat berdampak pada terhambatnya pelayanan publik serta tidak optimalnya pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai warga negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencegah terjadinya pelanggaran, serta mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara menyeluruh.

d. Pelayanan yang responsif

Dalam konteks penyelenggaraan administrasi kependudukan, pelayanan yang responsif merupakan bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah, khususnya perangkat kelurahan, yang mampu memahami,

[74] Sururama, R., & Amalia, R. (2020). Pengawasan pemerintahan.

menanggapi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, serta sesuai dengan harapan masyarakat.[75] Pelayanan yang responsif tidak hanya berfokus pada kecepatan pelayanan, tetapi juga pada kemampuan aparatur dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat secara efektif dan humanis. Secara konseptual, pelayanan publik merupakan kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kinerja pemerintah. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pelayanan yang responsif merupakan bagian dari prinsip *good governance*, yang menekankan pentingnya pemerintahan yang tanggap, transparan, dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat.

responsivitas dalam pelayanan publik diartikan sebagai kemampuan organisasi publik untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda pelayanan yang sesuai, serta mengembangkan program pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut.[76] Dengan demikian, pelayanan yang responsif tidak hanya bersifat reaktif (menunggu permintaan masyarakat), tetapi juga proaktif dalam mengidentifikasi dan menjawab kebutuhan masyarakat.

dalam hukum administrasi negara, pelayanan publik harus dilaksanakan dengan prinsip cepat, tepat, dan tidak diskriminatif. Hal ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagai warga negara serta mencegah terjadinya maladministrasi.[77] Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pelayanan yang responsif di Kelurahan Gedanganak dapat dilihat dari upaya

---

[75] Pristikawati, V., & Oktariyanda, T. A. (2024). Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Kantor Kelurahan Manyar Sabarangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. *Publika*, 49-62.
[76] Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), hlm. 50–52.
[77] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 214–216.

perangkat kelurahan dalam menyampaikan informasi terkait administrasi kependudukan kepada RT/RW serta menindaklanjuti data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).[78] Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, responsivitas pelayanan masih belum optimal karena belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara langsung. Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang belum mengurus dokumen kependudukan, bahkan cenderung bersikap apatis, sebagaimana ditemukan dalam kasus Bapak Mubaid. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya responsif terhadap kondisi sosial masyarakat. Dalam perspektif pelayanan publik, pelayanan yang responsif seharusnya mampu menjangkau masyarakat secara langsung, memahami permasalahan yang dihadapi, serta memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelayanan tidak boleh hanya menunggu masyarakat datang, tetapi juga harus aktif mendatangi masyarakat melalui program seperti pelayanan jemput bola. Selain itu, pelayanan yang responsif juga harus memperhatikan aspek komunikasi yang efektif, yaitu penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat serta pendekatan yang humanis.[79] Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.Apabila pelayanan tidak responsif, maka akan berdampak pada rendahnya kepuasan masyarakat, menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah, serta tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan publik.[80] Sebaliknya, pelayanan yang

---

[78] Jawang, S. D. L., & Martien, D. (2025). Sengketa Ombudsman dan Pelayanan Publik: Perlindungan Hak-Hak Warga Negara: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, *4*(1), 5628-5636.
[79] Adila, B. (2025). *ANALISIS HUKUM MENGENAI KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKALONGAN* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
[80] BP, H. W. (2015). ***Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Pemerintah.*** Jurnal Bina Praja, *7*(4), 331-346.

responsif akan mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendukung terciptanya tertib administrasi kependudukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang responsif merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Pelayanan yang responsif tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga pada kemampuan aparatur dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, sehingga tujuan pelayanan publik dapat tercapai secara optimal.

Namun berdasarkan hasil penelitian, implementasi keempat aspek tersebut belum berjalan secara optimal.

4.6. Analisis kasus empiris bapak mubaid

Kasus Bapak Mubaid merupakan salah satu temuan penting dalam penelitian ini karena menggambarkan secara nyata bagaimana kebijakan administrasi kependudukan tidak selalu berjalan efektif di tingkat masyarakat. Bapak Mubaid yang berusia 65 tahun dan berprofesi sebagai pedagang kaki lima menyatakan bahwa dirinya enggan mengurus KTP yang hilang karena merasa tidak mendapatkan manfaat dari kepemilikan dokumen tersebut. Pernyataan ini menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendalam, yaitu bukan sekadar kurangnya informasi, tetapi adanya pengalaman sosial yang membentuk persepsi negatif terhadap pemerintah. Dalam perspektif sosiologi hukum, hal ini menunjukkan bahwa hukum belum berfungsi secara efektif sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks ini, faktor masyarakat dan budaya hukum menjadi dominan karena rendahnya kesadaran dan kepercayaan

masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Lebih lanjut, apabila dianalisis menggunakan pendekatan Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya dipandang sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Namun dalam kasus ini, Bapak Mubaid tidak merasakan adanya manfaat nyata dari administrasi kependudukan, sehingga hukum kehilangan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial. Selain itu, persepsi bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada kelompok tertentu menunjukkan adanya masalah dalam distribusi kebijakan publik. Hal ini berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam teori pelayanan publik, kepercayaan *(trust)* merupakan elemen penting dalam menciptakan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, kasus Bapak Mubaid tidak dapat dipandang sebagai kasus individu semata, melainkan sebagai representasi dari sebagian masyarakat yang mengalami ketidakpercayaan terhadap sistem administrasi kependudukan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya administratif tetapi juga sosial dan kultural.

Dalam konteks administrasi kependudukan, pendekatan hukum semata tidak cukup untuk menjelaskan fenomena ketidaktertiban administrasi di masyarakat. Diperlukan pendekatan sosial dan kultural untuk memahami perilaku masyarakat dalam merespons kebijakan pemerintah. Hal ini dikarenakan hukum pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat sebagai subjek hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh faktor masyarakat, termasuk nilai, budaya, dan tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.[1] Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa masyarakat Kelurahan

Gedanganak masih memandang administrasi kependudukan sebagai sesuatu yang tidak memiliki manfaat langsung, sehingga cenderung diabaikan.

Pendekatan sosial menunjukkan bahwa masyarakat cenderung bersikap pragmatis, yaitu hanya melakukan sesuatu jika dianggap memberikan manfaat nyata. Hal ini terlihat dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa dirinya tidak mengurus KTP karena tidak pernah mendapatkan bantuan sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan antara persepsi manfaat dengan kepatuhan hukum.

Dari perspektif kultural, masyarakat memiliki kebiasaan yang sudah terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan tersebut sulit diubah tanpa adanya intervensi yang sistematis dari pemerintah. Oleh karena itu, peran preventif perangkat kelurahan tidak hanya sebatas memberikan informasi, tetapi juga harus mampu membentuk budaya tertib administrasi di masyarakat. Dengan demikian, pendekatan preventif harus dilakukan secara holistik, yaitu dengan menggabungkan pendekatan hukum, sosial, dan kultural agar dapat menciptakan perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

4.7. Imlikasi penelitian

Implikasi dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek teoritis, praktis, dan kebijakan. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Teori Mazmanian dan Sabatier menegaskan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kejelasan regulasi, tetapi juga pada dukungan masyarakat sebagai objek kebijakan. Dalam penelitian ini, meskipun regulasi telah jelas, namun kurangnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama.

Selain itu, konsep perlindungan hukum preventif yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon juga belum sepenuhnya terwujud. Perlindungan hukum preventif

seharusnya mampu mencegah terjadinya permasalahan sebelum muncul, namun dalam praktiknya masih ditemukan masyarakat yang belum tertib administrasi. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa aparatur kelurahan perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada aspek komunikasi dan pendekatan kepada masyarakat.[81]

Implikasi lainnya adalah perlunya inovasi dalam pelayanan, seperti penggunaan teknologi informasi, pelayanan jemput bola, serta peningkatan koordinasi dengan RT/RW. Dari sisi kebijakan, penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi terhadap implementasi administrasi kependudukan, khususnya dalam hal pemerataan manfaat. Masyarakat harus merasakan bahwa administrasi kependudukan memiliki dampak nyata dalam kehidupan mereka. Kasus Bapak Mubaid juga memberikan implikasi penting bahwa ketidakpercayaan masyarakat dapat berdampak pada rendahnya kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang adil, transparan, dan responsif. Dengan demikian, implikasi penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan administrasi kependudukan tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh hu bungan antara pemerintah dan masyarakat.

4.8. Analisis perspektif Masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan

Selain hasil wawancara dengan perangkat kelurahan dan informan sebelumnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kesadaran hukum

[81] Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara.

serta persepsi masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Hasil wawancara ini menunjukkan adanya variasi pandangan di tengah masyarakat yang secara langsung mempengaruhi efektivitas implementasi peran preventif perangkat kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudari Hijrotun Nafiah (30 tahun), yang beralamat di Perum Griya Cendana Blok, RT 03 RW 10, Gedanganak, Ungaran Timur, diperoleh keterangan bahwa administrasi kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurut beliau, dokumen kependudukan seperti KTP dan KK sangat dibutuhkan, khususnya dalam hal pengurusan perjalanan, termasuk pembuatan paspor dan keperluan administratif lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, sebagian masyarakat telah memahami fungsi strategis administrasi kependudukan sebagai alat legitimasi identitas diri.

Namun demikian, meskipun memiliki pemahaman mengenai pentingnya administrasi kependudukan, Saudari Hijrotun Nafiah menyatakan bahwa dirinya belum pernah merasakan manfaat secara langsung dalam bentuk bantuan sosial dari pemerintah. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pemahaman normatif dan pengalaman empiris masyarakat. Dalam perspektif hukum administrasi negara, hal ini dapat dikaitkan dengan belum optimalnya distribusi manfaat kebijakan publik yang berdampak pada persepsi masyarakat terhadap kebermanfaatan administrasi kependudukan.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Saudari Ester Kuswati (28 tahun), yang beralamat di Perum Griya Cendana Blok C RT 03 RW 10, Gedanganak, Ungaran Timur, menunjukkan pandangan yang sedikit berbeda. Beliau menyatakan bahwa administrasi kependudukan memang penting, namun tidak terlalu dirasakan

urgensinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan dirinya belum merasakan adanya timbal balik secara langsung dari kepemilikan dokumen kependudukan tersebut. Meskipun demikian, karena faktor usia yang masih relatif muda, beliau tetap memiliki dan mengurus dokumen kependudukan sebagaimana mestinya.

Pandangan yang disampaikan oleh Saudari Ester Kuswati menunjukkan adanya kecenderungan pragmatis dalam masyarakat, dimana penting atau tidaknya suatu kebijakan dinilai berdasarkan manfaat langsung yang dirasakan. Dalam konteks ini, administrasi kependudukan belum sepenuhnya dipahami sebagai kebutuhan dasar yang bersifat jangka panjang, melainkan masih dipandang sebagai kebutuhan administratif yang bersifat situasional.

Apabila kedua hasil wawancara tersebut dibandingkan dengan kasus Bapak Mubaid, terlihat adanya spektrum kesadaran hukum masyarakat yang cukup beragam. Bapak Mubaid cenderung menunjukkan sikap apatis karena tidak merasakan manfaat sama sekali, sementara Hijrotun Nafiah memahami pentingnya administrasi namun belum merasakan manfaat konkret, dan Ester Kuswati berada di posisi tengah dengan pemahaman yang ada tetapi belum disertai kesadaran penuh akan urgensinya.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, kondisi ini menunjukkan bahwa faktor masyarakat menjadi variabel dominan dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Rendahnya kesadaran hukum serta pengalaman sosial yang berbeda-beda menyebabkan implementasi administrasi kependudukan tidak berjalan secara optimal.

Selain itu, jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan

tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi juga oleh tingkat penerimaan dan partisipasi masyarakat sebagai objek kebijakan. Dalam hal ini, meskipun regulasi terkait administrasi kependudukan telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, namun implementasinya masih menghadapi kendala pada aspek sosial masyarakat.[82]

Lebih lanjut, fenomena ini juga menunjukkan bahwa peran preventif perangkat kelurahan belum sepenuhnya menyentuh aspek kesadaran dan kepercayaan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan masih bersifat administratif dan belum mampu membangun pemahaman yang mendalam mengenai manfaat jangka panjang administrasi kependudukan. Padahal, dalam konsep perlindungan hukum preventif, pemerintah seharusnya mampu memberikan edukasi dan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat agar dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa informan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang cukup signifikan terkait pentingnya administrasi kependudukan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pengalaman sosial, tingkat pemahaman, serta manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya implementasi peran preventif perangkat Kelurahan Gedanganak dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

---

[82] Misliani, L. (2025). Implementasi Kebijakan Daerah Terhadap Kepatuhan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Niara*, *18*(3), 891-901.

4.9. Efektivitas peran perangkat kelurahan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan

Efektivitas peran preventif perangkat kelurahan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan publik di tingkat lokal. Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Gedanganak, dapat diketahui bahwa perangkat kelurahan telah menjalankan fungsi preventif melalui mekanisme penyampaian informasi kepada RT/RW serta koordinasi dengan instansi terkait. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan peran tersebut masih belum optimal.

Hal ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan secara lengkap, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi preventif yang dilakukan masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh.

Dalam perspektif efektivitas hukum, suatu kebijakan dapat dikatakan efektif apabila mampu mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, tujuan dari administrasi kependudukan adalah terciptanya tertib administrasi serta terpenuhinya hak-hak sipil masyarakat. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai.

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya efektivitas tersebut adalah kurangnya pendekatan langsung kepada masyarakat. Perangkat kelurahan masih mengandalkan sistem komunikasi tidak langsung melalui RT/RW, sehingga informasi yang disampaikan tidak selalu diterima secara merata oleh masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas peran preventif perangkat

kelurahan masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih aktif dan partisipatif.

Selain faktor komunikasi tidak langsung, rendahnya efektivitas peran preventif perangkat kelurahan juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah aparatur maupun kapasitas kompetensi dalam melakukan edukasi kepada masyarakat. Dalam praktiknya, perangkat kelurahan cenderung lebih berfokus pada pelayanan administratif yang bersifat reaktif, seperti pembuatan KTP atau Kartu Keluarga ketika masyarakat datang mengajukan permohonan. Padahal, dalam kerangka preventif, aparatur seharusnya mampu mengidentifikasi potensi permasalahan administrasi sejak dini dan melakukan langkah-langkah pencegahan sebelum masalah tersebut muncul di masyarakat.[83]

Di sisi lain, faktor sosial dan budaya masyarakat juga turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi preventif tersebut. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pengurusan administrasi kependudukan bukan merupakan kebutuhan mendesak, sehingga cenderung menunda atau bahkan mengabaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak cukup hanya melalui penyampaian informasi, tetapi juga memerlukan strategi yang mampu membangun kesadaran hukum dan perubahan pola pikir masyarakat secara berkelanjutan.[84]

Untuk meningkatkan efektivitas peran preventif, diperlukan adanya inovasi dalam metode pelayanan dan penyuluhan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan

---

[83] Mahbubi, M. F. (2025). ***EFEKTIVITAS TUGAS KELURAHAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PEKAN KUALA KECAMATAN KUALA KABUPATEN LANGKAT*** (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara).

[84] Zanuary, M. R., & Munawaroh, N. (2025). ***EFEKTIVITAS PELAYANAN AKTA PERKAWINAN DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH*** (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

adalah dengan menerapkan sistem pelayanan "jemput bola", di mana perangkat kelurahan secara aktif mendatangi masyarakat, khususnya yang berada di wilayah dengan tingkat kepemilikan dokumen kependudukan yang rendah. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, seperti media sosial atau aplikasi pelayanan publik, juga dapat menjadi sarana efektif dalam menyebarluaskan informasi secara lebih luas dan cepat.[85] Lebih lanjut, diperlukan pula penguatan koordinasi antara kelurahan dengan instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar proses administrasi dapat berjalan lebih efisien dan terintegrasi. Dengan adanya sinergi tersebut, hambatan-hambatan yang selama ini dihadapi, baik dari sisi teknis maupun administratif, dapat diminimalisir. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam penyelenggaraan pelayanan publik.[86]

Dengan demikian, peningkatan efektivitas peran preventif perangkat kelurahan tidak hanya bergantung pada aspek internal kelembagaan, tetapi juga memerlukan dukungan dari masyarakat serta kolaborasi lintas sektor. Apabila seluruh elemen tersebut dapat berjalan secara optimal, maka tujuan utama dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, yaitu terciptanya tertib administrasi dan terpenuhinya hak-hak sipil masyarakat, akan lebih mudah untuk diwujudkan.[87]

---

[85] Mariani, D., Supriliyani, N. W., & Wijaya, K. A. S. (2025). Efektivitas Pelayanan E-KTP Melalui Sistem Jemput Bola (Sijebol) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar. *Socio-Political Communication and Policy Review*, *2*(1).

[86] Aditya W, R. M., & Ripa'i, A. (2025). ***COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ARUS URBANISASI DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN*** (Doctoral dissertation, institut Pemerintahan Dalam Negeri).

[87] Dwi Hendriani, S. K. M., St Hateriah, S., Sutrisno, A. P. P., Lily Herawati, S., Solihin Sayuti, S., Puspita Sari, S., ... & Ayu Dewi Mayasari, S. (2025). ***Pemberdayaan Masyarakat dalam Promosi Kesehatan: Strategi, Praktik, dan Implementasi*.** PT Bukuloka Literasi Bangsa.

4.10. Rendahnya kesadaran Masyarakat sebagai faktor penghambat tertib administrasi kependudukan

Kesadaran masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat keberhasilan administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil penelitian, rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor utama dalam ketidaktertiban administrasi kependudukan di Kelurahan Gedanganak. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa dokumen kependudukan tidak memiliki manfaat langsung dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung menunda atau bahkan mengabaikan kewajiban administratifnya.

Dalam perspektif sosiologis, kesadaran hukum masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi juga oleh pengalaman sosial dan kepercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat yang tidak merasakan manfaat dari kebijakan pemerintah cenderung memiliki tingkat kesadaran yang rendah.

Hal ini terlihat dari kasus yang ditemukan dalam penelitian, dimana terdapat masyarakat yang tidak mengurus dokumen kependudukan karena merasa tidak pernah mendapatkan bantuan sosial. Persepsi ini menunjukkan adanya hubungan antara kepercayaan masyarakat dengan tingkat kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui penyampaian informasi, tetapi juga harus melalui pendekatan yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat juga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan realitas yang dirasakan oleh masyarakat di lapangan. Kebijakan administrasi kependudukan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan

hak sipil, namun apabila masyarakat tidak merasakan manfaat konkret dari kebijakan tersebut, maka kepatuhan yang diharapkan tidak akan terbentuk secara optimal. Dalam kondisi ini, pendekatan yang bersifat normatif semata menjadi kurang efektif, sehingga diperlukan strategi yang lebih kontekstual dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.[88] Lebih lanjut, peningkatan kesadaran hukum masyarakat harus dilakukan melalui pendekatan yang berkelanjutan dan partisipatif. Perangkat kelurahan perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta RT/RW sebagai agen perubahan dalam menyampaikan pentingnya administrasi kependudukan. Dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat, pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima dan dipercaya. Pendekatan ini juga dapat memperkuat nilai-nilai kolektif dalam masyarakat untuk saling mengingatkan pentingnya tertib administrasi.[89] Di samping itu, penting bagi pemerintah untuk menunjukkan kehadiran dan manfaat nyata dari kebijakan administrasi kependudukan. Misalnya, dengan memastikan bahwa kepemilikan dokumen kependudukan benar-benar menjadi syarat utama dalam memperoleh berbagai layanan publik, seperti bantuan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian, masyarakat akan melihat adanya hubungan langsung antara kepemilikan dokumen dengan manfaat yang diperoleh, sehingga mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan secara alami.[90]

---

[88] Rahmadani, R. (2025). *Perspektif siyasah idariyah tentang kesadaran hukum masyarakat dalam mengurus akta kelahiran di Kampung Pulau Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).

[89] Mahbubi, M. F. (2025). *EFEKTIVITAS TUGAS KELURAHAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PEKAN KUALA KECAMATAN KUALA KABUPATEN LANGKAT* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara).

[90] Priyambodo, N. A., Niswah, F., & Fanida, E. H. (2026). EFEKTIVITAS PROGRAM GOES TO SCHOOL (GTS) DALAM KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN KTP-ELEKTRONIK BAGI USIA PEMULA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *4*(1).

Tidak kalah penting, transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik juga menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat. Pelayanan yang cepat, mudah, dan bebas dari praktik diskriminasi akan memberikan pengalaman positif bagi masyarakat, sehingga secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan dan kesadaran hukum mereka. Sebaliknya, apabila masyarakat mengalami kesulitan atau ketidakadilan dalam pelayanan, maka hal tersebut justru akan memperkuat sikap apatis terhadap administrasi kependudukan.[91] Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat dalam administrasi kependudukan memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui edukasi, tetapi juga melalui perbaikan kualitas pelayanan, penguatan kepercayaan publik, serta keterlibatan aktif berbagai unsur masyarakat. Apabila upaya tersebut dilakukan secara konsisten, maka tingkat kesadaran hukum masyarakat akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada terciptanya tertib administrasi kependudukan secara menyeluruh.[92]

4.11. Strategi peningkatan tertib administrasi kependudukan

Perangkat kelurahan memiliki peran penting sebagai pelayan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dalam konteks administrasi kependudukan, aparatur kelurahan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai edukator dan fasilitator bagi masyarakat.

---

[91] Lumbanraja, V., Rustiyana, R., Ibrahim, A. H. H., & Riyanto, A. (2025). *Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia: Konsep, Perkembangan, Prinsip dan Peran*. Star Digital Publishing.
[92] Zanuary, M. R., & Munawaroh, N. (2025). *EFEKTIVITAS PELAYANAN AKTA PERKAWINAN DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Berdasarkan hasil penelitian, perangkat kelurahan di Gedanganak telah menjalankan fungsi pelayanan, namun masih terdapat beberapa kekurangan, terutama dalam hal responsivitas dan pendekatan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan masih cenderung bersifat pasif, yaitu menunggu masyarakat datang untuk mengurus dokumen kependudukan. Padahal, dalam konsep pelayanan publik modern, aparatur dituntut untuk bersikap proaktif dalam menjangkau masyarakat. Selain itu, interaksi antara aparatur dan masyarakat juga masih terbatas, sehingga belum mampu membangun hubungan yang kuat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, peran aparatur kelurahan sebagai pelayan publik perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih humanis, komunikatif, dan responsif.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan juga perlu didukung oleh penguatan kapasitas aparatur, baik melalui pelatihan teknis maupun pengembangan soft skills seperti komunikasi interpersonal, empati, dan kemampuan problem solving. Aparatur yang memiliki kompetensi tersebut akan lebih mampu memahami kebutuhan masyarakat secara mendalam serta memberikan pelayanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran. Dalam konteks ini, profesionalisme aparatur menjadi kunci utama dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.[93] Lebih lanjut, perubahan paradigma pelayanan dari yang bersifat birokratis ke arah pelayanan yang berorientasi pada masyarakat (citizen-centered service) perlu terus didorong. Aparatur kelurahan harus mampu menempatkan masyarakat sebagai subjek pelayanan, bukan sekadar objek administratif. Hal ini dapat diwujudkan melalui pendekatan yang lebih

[93] Rahman, A., Fitriani, H., Mariestiara, S., Putran, F. A., & Sumarmo, S. (2025). Pelatihan soft skills dan time management bagi aparatur desa untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, *5*(2), 784-791.

humanis, seperti memberikan penjelasan yang mudah dipahami, bersikap ramah, serta membuka ruang dialog dengan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan kepuasan bagi masyarakat.[94]

Di sisi lain, pemanfaatan inovasi pelayanan juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan responsivitas aparatur kelurahan. Misalnya, dengan mengembangkan layanan berbasis digital, membuka layanan konsultasi administrasi, serta melakukan sosialisasi secara langsung ke masyarakat melalui program jemput bola. Inovasi-inovasi tersebut tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan, tetapi juga menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.[95]

Selain aspek internal, penting pula untuk membangun partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat perlu diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun masukan terkait pelayanan yang diterima. Dengan adanya mekanisme umpan balik (feedback), perangkat kelurahan dapat melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Hal ini juga akan memperkuat hubungan antara aparatur dan masyarakat, sehingga tercipta kepercayaan yang lebih baik.[96] Dengan demikian, peningkatan peran aparatur kelurahan sebagai pelayan publik tidak hanya bergantung pada kemampuan individu aparatur, tetapi juga pada sistem pelayanan yang dibangun secara menyeluruh. Melalui pendekatan yang proaktif, humanis,

---

[94] Abdullah, M. T., Sos, S., & AP, M. (2026). *Inovasi Sektor Publik: Teori, Paradigma, dan Praktiknya dalam Tata Kelola Pemerintahan Modern*. PT Bukuloka Literasi Bangsa.
[95] Yusman, Y., Putra, R. R., & Sinaga, I. (2024). *Penerapan sistem informasi untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik di era digital*. Serasi Media Teknologi.
[96] Rejeki, I. S., & Solihin, I. (2026). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Berbasis Digital Untuk Mewujudkan Tata Kelola Transparan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 7152-7165.

serta didukung oleh inovasi dan partisipasi masyarakat, diharapkan pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan lebih efektif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Implementasi Peran Preventif Perangkat Kelurahan Gedanganak dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013*, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi peran preventif perangkat Kelurahan Gedanganak dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan belum berjalan secara optimal dan menyeluruh.

Pelaksanaan peran preventif yang dilakukan oleh perangkat kelurahan masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mengarah pada upaya pencegahan yang aktif dan sistematis. Hal ini terlihat dari mekanisme pelayanan yang masih berorientasi pada pola pasif, yaitu menunggu masyarakat datang untuk mengurus dokumen kependudukan. Padahal, dalam konsep peran preventif, aparatur pemerintah seharusnya mampu melakukan tindakan-tindakan awal untuk mencegah timbulnya permasalahan administrasi kependudukan di masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan sosialisasi masih dilakukan secara tidak langsung melalui perantara RT/RW, sehingga informasi yang disampaikan tidak merata dan tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi peran preventif belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif.

2. Upaya preventif yang dilakukan masih terbatas pada penyampaian informasi dan belum didukung oleh tindakan nyata di lapangan.

Perangkat kelurahan telah melaksanakan upaya preventif dalam bentuk penyampaian informasi terkait administrasi kependudukan. Namun, upaya tersebut

belum diikuti dengan kegiatan yang lebih konkret seperti verifikasi data secara langsung ke masyarakat, pendampingan dalam pengurusan dokumen, maupun inovasi pelayanan seperti program jemput bola.

Akibatnya, masih ditemukan masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap atau bahkan tidak merasa perlu untuk mengurusnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya preventif yang dilakukan belum mampu mengubah perilaku masyarakat secara signifikan.

3. Terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas implementasi peran preventif.

Kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa dokumen kependudukan tidak memiliki manfaat langsung dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak menjadi prioritas untuk diurus.

Selain itu, terdapat pula faktor kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama terkait dengan distribusi bantuan sosial yang dianggap tidak merata. Kondisi ini menyebabkan masyarakat menjadi apatis dan enggan berpartisipasi dalam program administrasi kependudukan.

Di sisi lain, keterbatasan metode sosialisasi yang digunakan oleh perangkat kelurahan juga menjadi hambatan, karena penyampaian informasi yang tidak langsung menyebabkan banyak masyarakat tidak memperoleh informasi secara utuh.

4. Efektivitas sosialisasi administrasi kependudukan masih rendah dan belum mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara optimal.

Metode sosialisasi yang masih mengandalkan penyampaian melalui RT/RW terbukti kurang efektif dalam menjangkau seluruh masyarakat. Kurangnya interaksi

langsung antara aparatur dan masyarakat menyebabkan informasi yang disampaikan tidak dipahami secara mendalam.

Akibatnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan metode sosialisasi yang lebih inovatif, interaktif, dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

5. Pelayanan administrasi kependudukan perlu dikembangkan ke arah yang lebih responsif, proaktif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas administrasi kependudukan, perangkat kelurahan perlu mengubah paradigma pelayanan dari yang bersifat pasif menjadi aktif. Pelayanan yang responsif dan proaktif akan mampu menjangkau masyarakat yang selama ini kurang terlayani.

Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis dan persuasif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat membangun kepercayaan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara bertahap.

Dengan demikian, implementasi peran preventif yang optimal akan mampu menciptakan tertib administrasi kependudukan serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

A. Bagi Perangkat Kelurahan Gedanganak

Perangkat kelurahan diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan peran preventif secara lebih aktif, terencana, dan berkelanjutan. Sosialisasi kepada masyarakat tidak hanya dilakukan melalui RT/RW, tetapi juga secara langsung melalui kegiatan

penyuluhan, forum warga, serta pendekatan *door to door*. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan. Selain itu, perangkat kelurahan perlu mengembangkan inovasi pelayanan publik, seperti pelayanan jemput bola, pelayanan keliling, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan. Perangkat kelurahan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas komunikasi dengan masyarakat melalui penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta mengedepankan pendekatan yang humanis dan persuasif.

B. Bagi Aparatur Pemerintah (Kelurahan, RT/RW, dan Disdukcapil)

Diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergi antar aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Koordinasi tersebut tidak hanya dalam hal penyampaian informasi, tetapi juga dalam pelaksanaan verifikasi data, pemutakhiran data, serta pengawasan secara langsung di lapangan. Aparatur pemerintah diharapkan tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat, tetapi juga melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat telah memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan sah. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur juga perlu dilakukan melalui pelatihan dan pembinaan, sehingga aparatur dapat memberikan pelayanan yang profesional dan responsif.

C. Bagi Masyarakat Kelurahan Gedanganak

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya administrasi kependudukan sebagai dasar untuk memperoleh berbagai hak sebagai warga negara. Kepemilikan dokumen kependudukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap akses

pelayanan publik. Masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan sosialisasi dan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sikap apatis dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah perlu diubah melalui kesadaran bahwa administrasi kependudukan memiliki manfaat jangka panjang. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat menjalin komunikasi yang baik dengan perangkat kelurahan serta RT/RW, sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan secara bersama-sama.

D. Bagi pemerintah daerah

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara lebih merata, transparan, dan akuntabel. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan kepada kelurahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sistem informasi, serta peningkatan kapasitas aparatur. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan administrasi kependudukan, serta memastikan bahwa program-program bantuan sosial dapat disalurkan secara adil agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

E. Bagi peneliiti selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal ruang lingkup wilayah, waktu penelitian, serta jumlah informan yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas dan metode yang lebih variatif. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji lebih dalam mengenai faktor sosial, budaya, dan psikologis yang mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan. Selain itu, dapat pula

dilakukan penelitian komparatif antara beberapa daerah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Dengan demikian, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan ilmu hukum administrasi negara serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

5.3. Imlikasi penelitian

Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum administrasi negara, khususnya terkait dengan peran preventif dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan preventif memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya permasalahan hukum di masa depan. Oleh karena itu, paradigma pelayanan publik perlu diarahkan pada pendekatan preventif, bukan hanya kuratif. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya perangkat kelurahan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui pendekatan yang lebih aktif dan responsif.

5.4. Rekomendasi kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan, yaitu:

a) Pemerintah kelurahan perlu meningkatkan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat agar informasi dapat diterima secara merata.
b) Perangkat kelurahan perlu melakukan inovasi pelayanan, seperti pelayanan jemput bola, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

c) Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik.

d) Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik untuk membangun kepercayaan masyarakat.

5.5. Analisis kritis terhadap kebijakan administrasi kependudukan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa kebijakan administrasi kependudukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada dasarnya telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat dalam menjamin hak-hak sipil masyarakat. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal.

Secara normatif, kebijakan administrasi kependudukan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi serta memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Akan tetapi, dalam praktik di lapangan, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai karena masih adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan kondisi sosial masyarakat. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh efektivitas implementasi di lapangan. Dalam konteks ini, peran perangkat kelurahan menjadi sangat penting sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal.

Selain itu, kebijakan administrasi kependudukan juga perlu dilihat dari perspektif keadilan sosial. Masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap informasi atau layanan administrasi cenderung menjadi kelompok yang paling dirugikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.

Dengan demikian, analisis kritis terhadap kebijakan administrasi kependudukan menunjukkan bahwa diperlukan perbaikan dalam aspek implementasi, khususnya dalam hal pendekatan kepada masyarakat.

5.6. Urgensi peningkatan kualitas sumber daya aparatur

Dalam rangka meningkatkan efektivitas administrasi kependudukan, diperlukan suatu model pelayanan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga preventif. Model pelayanan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan sebelum muncul, sehingga dapat mengurangi beban administratif di kemudian hari.

Model ideal pelayanan administrasi kependudukan berbasis preventif dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

a) Pendekatan edukatif, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan melalui kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan.[97]
b) Pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pendataan dan pengawasan administrasi kependudukan.[98]
c) Pendekatan proaktif, yaitu melakukan pelayanan jemput bola untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan.[99]

---

[97] Hastian, T., Serah, Y. A., Setiawati, R., & Marpaung, S. (2025). PKK dan Inovasi Edukasi Administrasi Kependudukan: Strategi Mewujudkan KISAK di Era Digital. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, *5*(3), 5121-5131.

[98] Fkun, E., Rihi, A., Naitili, J. B., Wangga, V. M., Taek, A., & Jehatut, F. B. (2026). PENDATAAN KEPENDUDUKAN DESA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENGUATAN ADMINISTRASI DESA UMUTNANA KABUPATEN MALAKA. *PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)*, *4*(01), 253-260.

[99] Savika, N. (2024). *EFEKTIFITAS PROGRAM JEMPUT BOLA DALAM PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (KTP-el) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PINRANG* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

d) Pendekatan humanis, yaitu memberikan pelayanan dengan sikap ramah, terbuka, dan tidak diskriminatif agar masyarakat merasa nyaman dalam mengurus administrasi.[100]

e) Pendekatan Yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis (aturan perundang-undangan), tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan, dipahami, dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat.[101]

Dengan adanya model pelayanan preventif, diharapkan masyarakat tidak hanya patuh terhadap aturan, tetapi juga memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

5.7. Penguatan kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah

Keberhasilan administrasi kependudukan tidak hanya bergantung pada peran perangkat kelurahan, tetapi juga memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti RT/RW, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta masyarakat.

Kolaborasi antar lembaga menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa data kependudukan yang dimiliki pemerintah akurat dan mutakhir. Tanpa adanya koordinasi yang baik, maka akan terjadi ketidaksinkronan data yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan administratif. Dalam konteks penelitian ini, kolaborasi antara kelurahan dan RT/RW sudah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal komunikasi dan koordinasi.

Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam mendukung keberhasilan administrasi kependudukan. Masyarakat tidak hanya sebagai objek pelayanan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga

---

[100] Yuliana, Y. (2021). *Penerapan Human Relation Dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Siddo Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

[101] Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, *4*(3), 114-128.

tertib administrasi. Dengan demikian, kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Selain itu, kolaborasi yang efektif tidak hanya terbatas pada hubungan formal antar lembaga, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk sinergi yang berkelanjutan dan terintegrasi. Perangkat kelurahan, RT/RW, serta instansi terkait perlu memiliki mekanisme komunikasi yang jelas, seperti pertemuan rutin, pelaporan berkala, serta sistem berbagi data yang terstruktur. Dengan adanya koordinasi yang sistematis, potensi terjadinya kesalahan data maupun keterlambatan pelayanan dapat diminimalisir. Hal ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pentingnya integrasi dan sinkronisasi dalam pelayanan public.[102]

Lebih lanjut, dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern, konsep *collaborative governance* menjadi pendekatan yang relevan dalam meningkatkan efektivitas administrasi kependudukan. Melalui pendekatan ini, pemerintah tidak lagi bekerja secara sendiri, melainkan melibatkan berbagai aktor, termasuk masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memiliki tingkat keberterimaan yang lebih tinggi.[103]

Di sisi lain, penguatan peran RT/RW sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat paling bawah juga perlu menjadi perhatian. RT/RW memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, sehingga berperan strategis dalam mendata, menyampaikan informasi, serta mendorong masyarakat untuk tertib administrasi.

---

[102] Amin, R. (2025). *Model Kolaborasi Kebijakan Penataan Kawasan Berkelanjutan di Kelurahan Pisangan Baru Provinsi DKI Jakarta* (Doctoral dissertation, Politeknik STIA LAN Jakarta).
[103] Wulandjani, H., Widiyahseno, B., Utomo, E. N., Megaster, T., Sudarmanto, E., Saleha, D., ... & Islam, N. (2025). *Collaborative Governance*. Penerbit Minhaj Pustaka Indonesia.

Namun, agar peran tersebut dapat berjalan optimal, diperlukan dukungan berupa pembinaan, pelatihan, serta fasilitas yang memadai dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah.[104]

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi sarana pendukung dalam memperkuat kolaborasi antar pihak. Sistem informasi administrasi kependudukan yang terintegrasi memungkinkan adanya pertukaran data secara cepat dan akurat antara kelurahan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian, proses pelayanan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel.[105]

Pada akhirnya, keberhasilan administrasi kependudukan sangat ditentukan oleh komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi yang baik tidak hanya menghasilkan data yang akurat, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban administratifnya. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat sinergi antar pihak harus terus dilakukan secara berkelanjutan, agar tujuan utama yaitu terciptanya tertib administrasi kependudukan dapat terwujud secara optimal.[106]

5.8. Urgensi peningkatan kualitaas sumber daya aparatur

Kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelayanan publik. Aparatur yang kompeten akan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik serta memahami kebutuhan masyarakat secara tepat.

---

[104] Rini, W. S. (2019). Peranan Street Level Bureaucracy Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (Studi Tentang Peranan Rt/Rw Di Kota Depok).

[105] Mas'ud, A., & Maulana, A. (2025). PROGRAM PELAYANAN ADMINDUK J-MONALISADALAM PERSPEKTIF E-GOVERNMENT DI KABUPATENJEMBER. *Interelasi Humaniora*, *1*(4), 289-301.

[106] Sentanu, I. G. E. P. S., Yustiari, S. H., & S AP, M. P. A. (2024). *Mengelola kolaborasi stakeholder dalam pelayanan publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

Dalam konteks administrasi kependudukan, aparatur kelurahan dituntut untuk memiliki kemampuan administratif, komunikasi, serta pemahaman hukum yang baik. Namun, berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat keterbatasan dalam hal kapasitas aparatur.[107] Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Pelatihan tersebut dapat meliputi:

a) Pelatihan pelayanan publik
b) Pelatihan komunikasi sosial
c) Pelatihan penggunaan teknologi administrasi

Dengan adanya peningkatan kapasitas aparatur, diharapkan pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan lebih efektif dan profesional.

5.9. Penegasan akhir *(closing statement)*

Berdasarkan seluruh hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditegaskan bahwa administrasi kependudukan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena berkaitan langsung dengan pengakuan identitas serta pemenuhan hak-hak sipil warga negara.[108]

Perangkat kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan memiliki peran strategis dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan, khususnya melalui pendekatan preventif. Namun, dalam praktiknya, peran tersebut belum berjalan secara optimal karena masih adanya berbagai kendala, baik dari sisi aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah dan

---

[107] Imbiri, R. A., Sinen, K., & Andriyan, Y. (2025). PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KEPADA MASYARAKAT DI KELURAHAN MARIAT PANTAI DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG. *JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK*, *5*(3), 488-496.
[108] Dipahandi, A. (2009). *ASPEK HUKUM AKTA CATATAN SIPIL YANG DITERBITKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON (SUATU KAJIAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta kesadaran hukum agar tujuan dari administrasi kependudukan dapat tercapai secara maksimal.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum administrasi negara serta memberikan manfaat praktis bagi peningkatan pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang memadai, tetapi juga oleh implementasi kebijakan yang konsisten di lapangan. Dalam hal ini, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kemampuan aparatur dalam menerjemahkan aturan ke dalam praktik pelayanan yang nyata dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, aspek implementasi menjadi kunci utama dalam menjembatani antara norma hukum dan realitas sosial.[109]

Di samping itu, penting untuk dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan. Evaluasi tersebut dapat mencakup aspek kecepatan pelayanan, akurasi data, kepuasan masyarakat, serta efektivitas komunikasi antara aparatur dan warga. Melalui evaluasi yang berkelanjutan, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan yang ada serta merumuskan langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran.[110]

Penelitian ini juga menegaskan bahwa pendekatan yang humanis dan partisipatif merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Aparatur kelurahan tidak hanya dituntut untuk menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus mampu membangun hubungan yang baik dengan

---

[109] Dewantari, N. A., & Kurniawan, I. D. (2021). Implementasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen sebagai upaya tertib administrasi kependudukan di Kota Surakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *2*(5), 1413-1432.
[110] Wahyudi, A., & Yamin, A. (2025). Pengaruh Teknologi Informasi, Kompetensi SDM dan Penggunaan Aplikasi Erasmart melalui Desa dan Kelurahan (Lesehan) terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat). *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *8*(5), 4962-4979.

masyarakat. Dengan adanya hubungan yang harmonis, masyarakat akan lebih terbuka, kooperatif, dan memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam mengurus administrasi kependudukan.[111]

Selain itu, penguatan sinergi antar lembaga serta pemanfaatan teknologi informasi perlu terus dikembangkan guna mendukung terciptanya sistem administrasi kependudukan yang modern, efektif, dan efisien. Integrasi data serta kemudahan akses layanan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.[112]

Akhirnya, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan administrasi kependudukan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya komitmen yang kuat, peningkatan kualitas pelayanan, serta kesadaran hukum yang terus ditumbuhkan, maka tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta perlindungan hak-hak sipil masyarakat akan dapat tercapai secara optimal. Penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi kajian akademis, tetapi juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan serta peningkatan praktik pelayanan publik di tingkat kelurahan ke depan.[113]

---

[111] Haifa, S., & Firdaus, M. (2025). Kepemimpinan Camat Dalam Menentukan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Cimahi Tengah. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, *10*(4), 849-863.

[112] Mozin, S. Y., Abdullah, S., & Sawali, N. (2025). Pemanfaatan Teknologi Cerdas Untuk Pelayanan Publik: Study Tentang e-Government Dan Smart City Berbasis ICT Big Data Dan AI. *JPS: Journal of Publicness Studies*, *2*(2), 117-130.

[113] INDRAWAN, M. A. (2025). *Perilaku Aparatur Sipil Negara Dalam Memberikan Pelayanan Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang= The Behavior of State Civil Apparatus in Providing KTP Services at the Population and Civil Registration Service of Enrekang Regency* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015

Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*. Berkeley: University of California Press, 2021

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021

Laelasari Ekaningsih, *Hukum Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Publik di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021

Laelasari Ekaningsih, *Hukum Administrasi Kependudukan: Transformasi Pelayanan Publik di Indonesia*. Semarang: Unissula Press, 2021

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021

Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021

Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022

Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

JURNAL ILMIAH

Siti Maria Ulfa, "Problematika Yuridis Validitas Data Kependudukan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum," *Jurnal Hukum dan Regulasi*, Vol. 5, No. 2, 2023

Siti Maria Ulfa, "Problematika Yuridis Validitas Data Kependudukan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum," *Jurnal Hukum Kependudukan*, Vol. 5, No. 2, 2023

Anggraini, M. D., dan Manar, D. G., "Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui SIAK," *Journal of Politic and Government Studies*, 2025

Pristikawati, V., dan Oktariyanda, T. A., "Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan," *Publika*, 2024

Madjid, U., "Quality of Public Services," *Journal of Ecohumanism*, 2024

Jawang, S. D. L., dan Martien, D., "Sengketa Ombudsman dan Pelayanan Publik," 2025

BP, H. W., "Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat," *Jurnal Bina Praja*, 2015

Misliani, L., "Implementasi Kebijakan Daerah," *Jurnal Niara*, 2025

Rejeki, I. S., dan Solihin, I., "Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pelayanan Publik," 2026

Mariani, D., dkk., "Efektivitas Pelayanan E-KTP," 2025

Priyambodo, N. A., dkk., "Efektivitas Program Goes To School," 2026

Rahman, A., dkk., "Pelatihan Soft Skills Aparatur Desa," 2025

Mozin, S. Y., dkk., "Pemanfaatan Teknologi Cerdas untuk Pelayanan Publik," 2025

Mas'ud, A., dan Maulana, A., "Pelayanan Adminduk Perspektif E-Government," 2025

Imbiri, R. A., dkk., "Pelayanan Administrasi Kependudukan," 2025

Dewantari, N. A., dan Kurniawan, I. D., "Implementasi Kebijakan Pendataan Penduduk," 2021

Wahyudi, A., dan Yamin, A., "Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kepuasan Masyarakat," 2025

Haifa, S., dan Firdaus, M., "Kepemimpinan Camat dalam Pelayanan Publik," 2025

Hastian, T., dkk., "Inovasi Edukasi Administrasi Kependudukan," 2025

Fkun, E., dkk., "Pendataan Kependudukan Berbasis Partisipasi," 2026

SKRIPSI/DISERTASI

Adila, B., *Analisis Hukum Mengenai Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan*. Universitas Islam Sultan Agung, 2025

Mala, M., *Pelaksanaan Penerbitan Dokumen Kependudukan*. Universitas Lancang Kuning, 2021

Rahmadani, R., *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mengurus Akta Kelahiran*. UIN Padangsidimpuan, 2025

Mahbubi, M. F., *Efektivitas Tugas Kelurahan*. Universitas Islam Sumatera Utara, 2025

Zanuary, M. R., dan Munawaroh, N., *Efektivitas Pelayanan Akta Perkawinan*. IPDN, 2025

Kamaludin, M. R., *Strategi Komunikasi Edukasi Administrasi Kependudukan*. Unissula, 2025

Muqodas, A., dkk., *Analisis Perubahan Penggunaan Lahan*. UMS, 2015

Aditya W, R. M., dan Ripa'i, A., *Collaborative Governance*. IPDN, 2025

Savika, N., *Efektivitas Program Jemput Bola*. IAIN Parepare, 2024

Yuliana, Y., *Human Relation dalam Pelayanan Publik*. IAIN Parepare, 2021

Amin, R., *Model Kolaborasi Kebijakan*. STIA LAN, 2025

Dipahandi, A., *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil*. UNDIP, 2009

Indrawan, M. A., *Perilaku ASN dalam Pelayanan KTP*. Universitas Hasanuddin, 2025

SUMBER LAIN

Adila, B., *Analisis Hukum Mengenai Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan*. Universitas Islam Sultan Agung, 2025

Mala, M., *Pelaksanaan Penerbitan Dokumen Kependudukan*. Universitas Lancang Kuning, 2021

Rahmadani, R., *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mengurus Akta Kelahiran*. UIN Padangsidimpuan, 2025

Mahbubi, M. F., *Efektivitas Tugas Kelurahan*. Universitas Islam Sumatera Utara, 2025

Zanuary, M. R., dan Munawaroh, N., *Efektivitas Pelayanan Akta Perkawinan*. IPDN, 2025

Kamaludin, M. R., *Strategi Komunikasi Edukasi Administrasi Kependudukan*. Unissula, 2025

Muqodas, A., dkk., *Analisis Perubahan Penggunaan Lahan*. UMS, 2015

Aditya W, R. M., dan Ripa'i, A., *Collaborative Governance*. IPDN, 2025

Savika, N., *Efektivitas Program Jemput Bola*. IAIN Parepare, 2024

Yuliana, Y., *Human Relation dalam Pelayanan Publik*. IAIN Parepare, 2021

Amin, R., *Model Kolaborasi Kebijakan*. STIA LAN, 2025

Dipahandi, A., *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil*. UNDIP, 2009

Indrawan, M. A., *Perilaku ASN dalam Pelayanan KTP*. Universitas Hasanuddin, 2025

LAMPIRAN



1. WAWANCARA DENGAN STAF KELURAHAN IBU SRI WAHYUNINGSIH.,S.H.



2. WAWANCARA DENGAN LURAH KELURAHAN GEDANGANAK BAPAK YUNIANTO.,S.H.



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN UNGARAN TIMUR
KELURAHAN GEDANGANAK

DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Jl. Natuna No. 2 Gedanganak Kode Pos 50519 Telp. (024) 6922805

SURAT KETERANGAN
NO. 145/ 450 / IV/ 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : YUNIANTO, SH. MA
NIP : 19710612 199503 001
Jabatan : Lurah Gedanganak
Alamat : Jl. Natuna No 2 RT 02 RW 02 Kelurahan Gedanganak

Menerangkan Bahwa

1. Nama : HOFIFAH
   NIM : 22.11.0010
   Fakultas : FAKULTAS HUKUM
   Progran Studi : ILMU HUKUM
   Alamat : UNDARIS

Telah melaksanakan penelitian untuk pembuatan Skripsi dengan judul " IMPLEMENTASI PERAN PREVENTIF PERANGKAT KELURAHAN GEDANGANAK DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MASYARAKAT BERDASARKAN UU NOMOR. 24 TAHUN 2013" dimulai tanggal 02 s/d 09 April 2026

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Gedanganak, 09 April 2026
LURAH GEDANGANAK

YUNIANTO, SH MA
Pembina
NIP. 19710612 199503 001

3. BUKTI PENULIS TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN DIKELURAHAN GEDANGANAK PADA 02-09 APRIL 2026



4. WAWANCARA DENGAN IBU HIJROTUN NAFI'AH WARGA KELURAHAN GEDANGANAK



5. WAWANCARA DENGAN WARGA KELURAHAN GEDANGANAK IBU ESTER KUSWATI



6. WAWANCARA DENGAN BAPAK MUBAID WARGA WATUBUBAN KELURAHAN GEDANGANAK